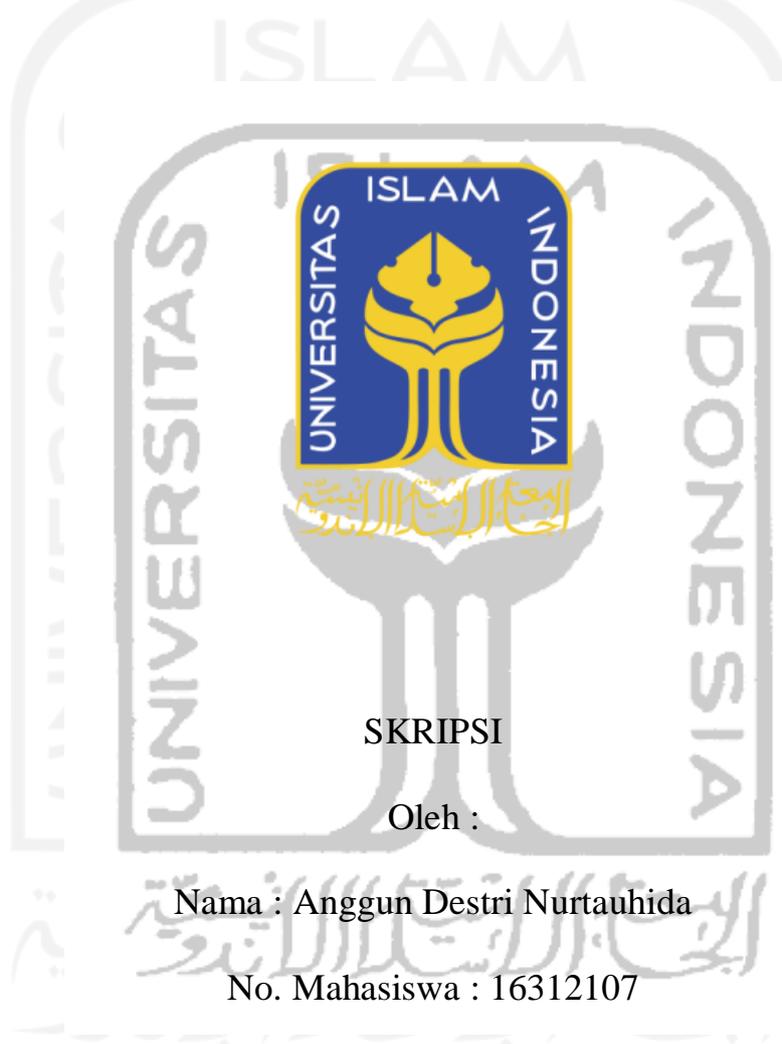


**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN INTENSITAS ASET
TETAP TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018)**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Anggun Destri Nurtauhida

No. Mahasiswa : 16312107

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN INTENSITAS ASET TETAP
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode 2016 – 2018)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh :

Nama : Anggun Destri Nurtauhida

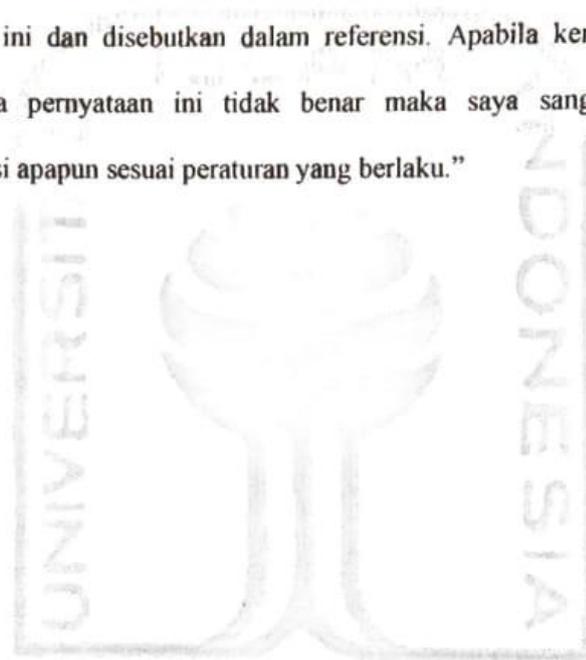
No. Mahasiswa : 16312107

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari ini terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

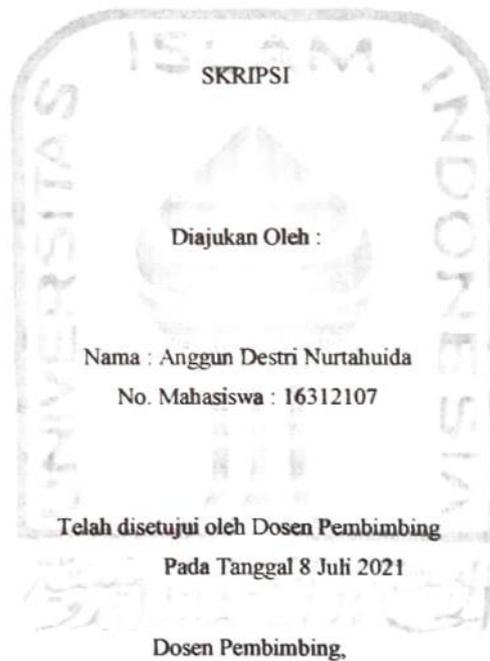


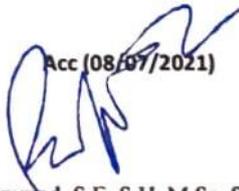
Yogyakarta, 8 Juli 2021

Penulis,

(Anggun Destri Nurtauhida)

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, GOOD
CORPORATE GOVERNANCE, DAN INTENSITAS ASET TETAP
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode 2016 – 2018)**




Acc (08/07/2021)

(Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS., ASPM., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016 - 2018)

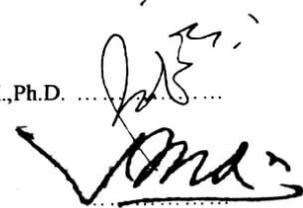
Disusun Oleh : **ANGGUN DESTRI NURTAUHIDA**
Nomor Mahasiswa : **16312107**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Rabu, 04 Agustus 2021**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc.,SAS.,ASPM.,Ph.D.

Penguji : Sugeng Indardi, Drs., M.B.A.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sehingga sampai saat ini mengamalkan ajarannya hingga akhir zaman nanti. Penelitian berjudul “PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018) disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kepada penulis rahmat, karunia, kesehatan, kemudahan, kesempatan, akal dan ilmu sehingga penulis dapat menuntut ilmu Strata 1 hingga selesai sampai akhir.

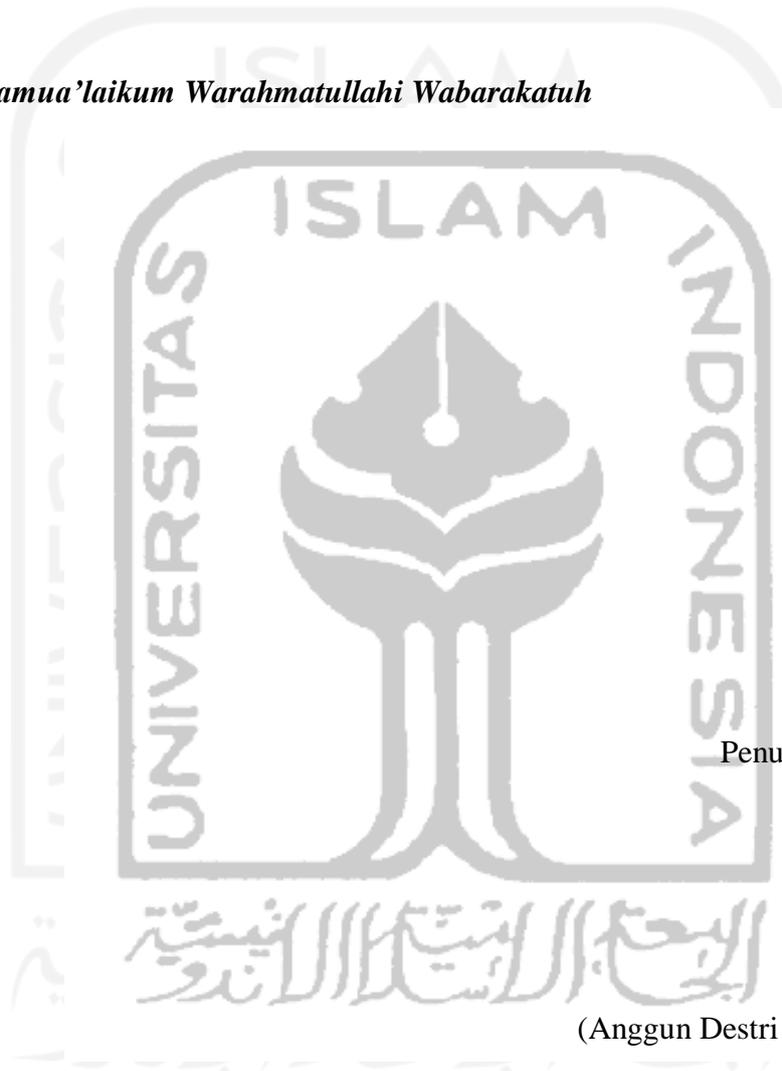
2. Nabi Muhammad SAW, yang memberikan suri tauladan bagi umat muslim. Semoga penulis dapat mengamalkan ilmu dan ajaran beliau dalam kehidupan sehari – hari.
3. Bapak Madiyono dan Ibu Eni Wuryanti, selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, nasihat, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Dion Putra Ihsanul Huda dan Ade Putra Nurhuda, selaku kakak kandung penulis, yang telah memberikan dorongan, motivasi, saran, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semangat.
5. Bapak Rifqi Muhammad S.E., M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, dukungan kepada penulis serta selalu memantau perkembangan penulis dalam menyusun skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta segenap jajaran pimpinan universitas.
7. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Mahmudi, Dr. S.E., M.Si., Ak., CMA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi FBE UII beserta segenap jajaran pengajar program studi Akuntansi.
9. Murniati Ramdhani dan Zahra Monica Damayanti, sebagai sahabat semasa kuliah, terima kasih telah menjadi teman belajar yang memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan

semangat, menemani penulis dalam mencari hiburan serta memberi canda tawa. Semoga kesuksesan menyertai kalian.

10. Meilisha Intan dan Parramita Desita, sebagai sahabat penulis semasa SMA hingga saat ini. Terima kasih telah memberikan canda dan tawa, menemani penulis mencari hiburan, memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga kesuksesan menyertai kalian.
11. Nadia Husnaningtyas, Safira Diva, Alya Salmaa Dewi, Saraswati, Qintan Prina, dan Lariza Putri, sebagai teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan belajar di FBE UII. Terima kasih telah menjadi teman yang baik dari awal kuliah hingga saat ini. Yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta memberikan canda tawa bagi penulis.
12. Rahmadani Ningtyas Sekar Putri dan Afifah Nabila, sebagai teman belajar bersama semasa kuliah. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan saran selama ini.
13. Teman teman kethekur, sebagai teman awal masuk kuliah, terima kasih atas dukungannya selama ini.
14. Bapak, Ibu Aris dan Teman teman KKN Unit 8 Padukuhan Dadapan, terdiri dari Rizal, Ivan, Nur Khoirun, Alsa, Brili dan Rizki. Terima kasih atas doa, dukungan, serta pengalaman yang tak terlupakan.
15. Teman- teman jurusan Akuntansi 2016, terima kasih atas dukungan, bantuan, dan pengalaman selama ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, serta bantuan kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang dari sempurna oleh karena itu, perlu kritik dan saran agar hasil penelitian ini dapat memberikan bantuan serta manfaat kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan.

Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Penulis,

(Anggun Destri Nurtauhida)

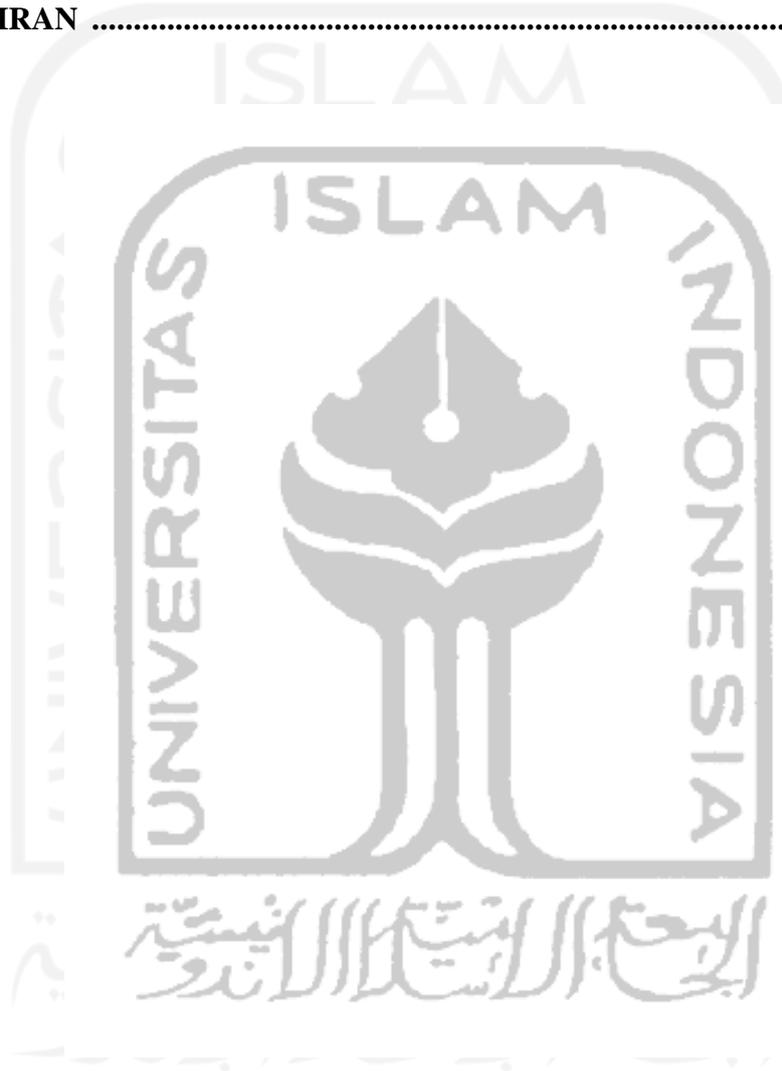
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	8
2.1.2 <i>Stakeholder Theory</i>	8
2.1.3 <i>Legitimacy Theory</i>	9
2.1.4 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	10
2.1.5 <i>Corporate Social Responsibility</i>	11
2.1.6 <i>Good Corporate Governance</i>	11
2.1.7 Komisaris Independen	13
2.1.8 Komite Audit.....	14
2.1.9 Kualitas Audit.....	15
2.1.10 Kepemilikan Manajerial.....	16
2.1.11 Kepemilikan Institusional.....	16

2.1.12 Intensitas Aset Tetap.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Hipotesis Penelitian	28
2.4 Kerangka Pemikiran	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
3.1 Populasi dan Sampel.....	35
3.2 Metode Pengumpulan Data	36
3.3 Variabel Penelitian	36
3.3.1 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	36
3.3.2 <i>Corporate Social Responsibility</i>	38
3.3.3 Komisaris Independen	39
3.3.4 Komite Audit.....	39
3.3.5 Kualitas Audit	40
3.3.6 Kepemilikan Manajerial	41
3.3.7 Kepemilikan Institusional.....	42
3.3.8 Intensitas Aset Tetap.....	42
3.4 Metode Analisis Data.....	43
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	43
3.4.2 Analisis Model Data Panel.....	43
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	44
3.4.2.1 Uji Normalitas	44
3.4.2.2 Uji Multikolinieritas	45
3.4.2.3 Uji Autokorelasi	46
3.4.2.4 Uji Heterokedastisitas	46
3.4.4 Analisis Regresi Berganda	47
3.4.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	48
3.4.6 Uji F / Uji Kelayakan Model (<i>Goodness of Fit</i>)	49
3.4.7 Uji Hipotesis (Uji t)	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	51

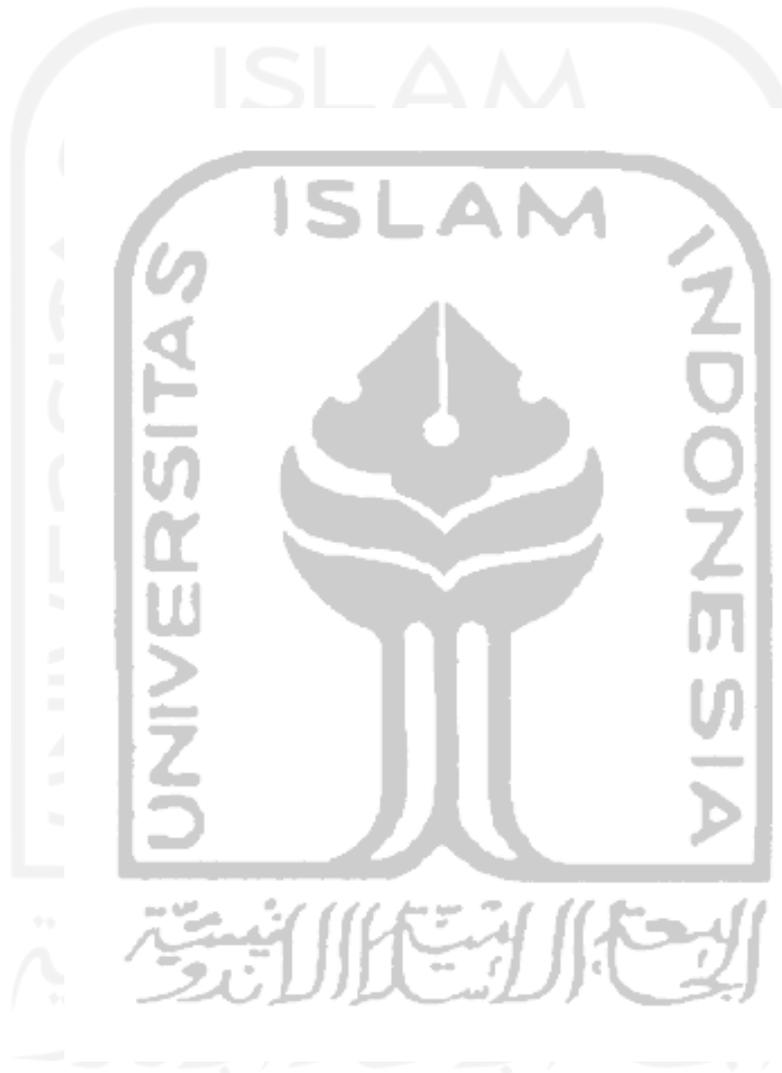
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	51
4.2	Statistik Deskriptif	52
4.3	Analisis Model Data Panel	56
4.3.1	Uji Chow.....	56
4.3.2	Uji Hausmann	57
4.4	Pengujian Asumsi	58
4.4.1	Uji Multikolinieritas.....	58
4.4.2	Uji Heteroskedastisitas.....	58
4.4.3	Uji Normalitas	59
4.4.4	Uji Autokorelasi.....	59
4.5	Persamaan Regresi Data Panel	60
4.5.1.	Pengujian Signifikansi Individual (Uji t)	61
4.5.2.	Pengujian Koefisien Determinasi	62
4.5.3.	Pengujian Signifikansi secara Keseluruhan (Uji F)	62
4.6	Pembahasan (Interprestasi)	62
4.6.1.	Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran pajak	62
4.6.2.	Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak	65
4.6.3.	Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak	66
4.6.4.	Pengaruh kualitas audit terhadap panghindaran pajak	68
4.6.5.	Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak	69
4.6.6.	Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak	70
4.6.7	Pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		72

5.1. Kesimpulan	72
5.2. Keterbatasan dan Saran.....	72
5.3. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	79



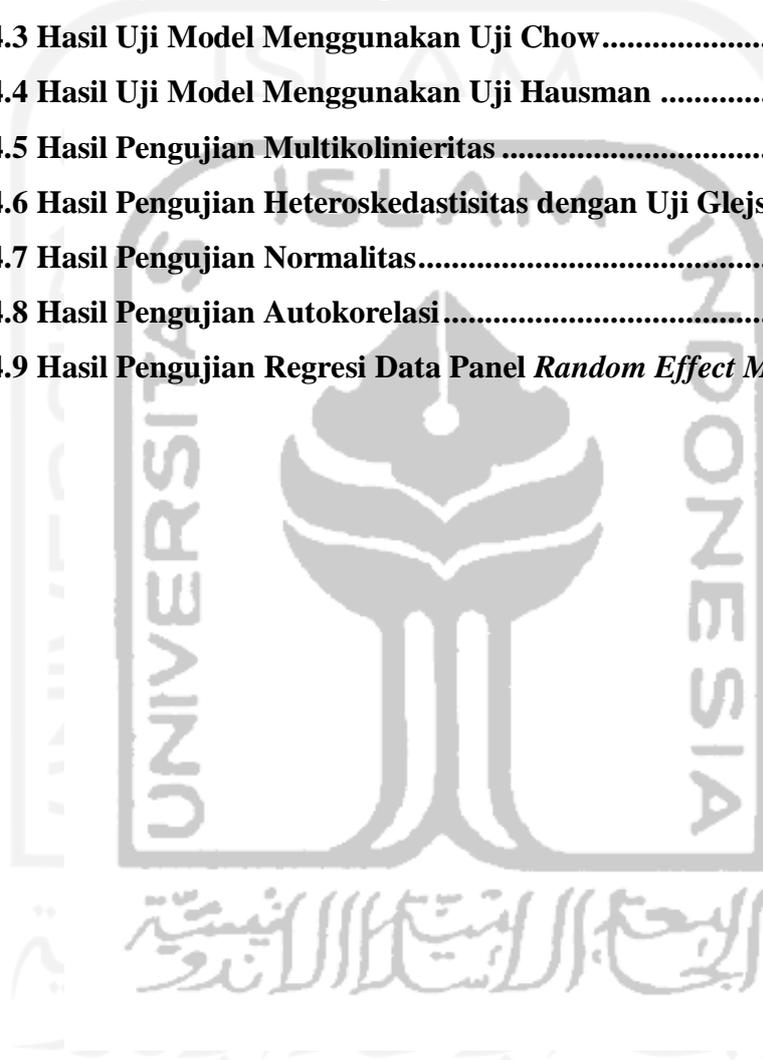
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 31



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Hasil Sampel	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Model Menggunakan Uji Chow.....	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Model Menggunakan Uji Hausman	57
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Multikolinieritas	58
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser	59
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Normalitas.....	59
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Autokorelasi.....	60
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i>	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 91 Indikator Berdasarkan GRI G4.....	79
Lampiran 2. Daftar Perusahaan	86
Lampiran 3. Data Penelitian	87
Lampiran 4. Hasil Penelitian.....	90



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility*, *Good Corporate Governance* dan Intensitas Aset Tetap terhadap penghindaran pajak. *Good Corporate Governance* dibagi menjadi lima yaitu komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Sampel dalam penelitian ini ada 35 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018. Metode dalam pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresi panel, dan uji asumsi klasik dengan menggunakan Eviews 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *corporate social responsibility*, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, intensitas aset tetap, dan penghindaran pajak.

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of corporate social responsibility, good corporate governance, and fixed asset intensity on tax avoidance. Good corporate governance divided into five, there are independent commissioner, audit committee, audit quality, managerial ownership, and institutional ownership. The sample are 35 firm-year observations from manufactured companies which are listed in Indonesia Stock Exchange during 2016-2018. The samples are selected by using purposive sampling. This research used descriptive statistical test, panel regression test, and classic assumption test, using Eviews 8. The results of this study indicates that corporate social responsibility had a significant negative effect on the tax avoidance, while independent commissioner, audit committee, audit quality, managerial ownership, institutional ownership, and fixed asset intensity did not significantly influence on tax avoidance.

Keywords: *corporate social responsibility, independent commissioner, audit committee, audit quality, managerial ownership, institutional ownership, fixed asset intensity, and tax avoidance.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah suatu penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan belanja negara. Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling tinggi dibandingkan pendapatan lainnya. Pada tahun 2019 total penerimaan pendapatan negara sebesar 2.165, 1 triliun dan sebesar 1.786, 4 triliun dari penerimaan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Pajak memiliki peran sangat penting khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Peranan pajak dalam pembangunan sangat penting karena peranannya menunjang pertumbuhan ekonomi. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dalam suatu negara berkembang adalah merupakan penerimaan terbesar, seperti halnya Indonesia pajak menyumbangkan pendapatan lebih dari 70% (Yuliana, 2014). Penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai Rp. 1.151 triliun atau 89,7% dari target APBNP 2017. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai hasil yang baik berkat kesadaran

dan kepatuhan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan bagian masing-masing (www.pajak.go.id).

Pajak bagi perusahaan merupakan laba bersih yang akan dikurangkan sebagai beban sehingga pembayaran pajak selalu diinginkan oleh perusahaan seminimal mungkin (M. Sari M, R. & Kurniasih, 2013). Adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemiliknya maka ada upaya untuk penghindaran pajak (Chen dkk., 2010). Perusahaan memanfaatkan regulasi yang tidak jelas dalam rangka penghindaran pajak untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkan penghindaran pajak merupakan pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak yang berawal dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering* (Hanlon & Heitzman, 2010).

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia berdampak pada penurunan pencapaian penerimaan pajak. Penurunan persentase pencapaian penerimaan pajak dipicu oleh banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Pajak menjadi beban perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih (Yulyanah & Sri, 2019). Oleh karena itu, melakukan penghindaran pajak menjadi cara perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya ke kas negara (Kurniasih & Sari, 2013). Perusahaan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan sebagai salah satu tindakan legal dalam penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang terutang (Pohan C. A, 2013). Hal ini dapat dibuktikan dari

pencapaian realisasi penerimaan pajak dalam APBN tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	(%)
2013	Rp1148,4	Rp1077,3	93
2014	Rp1246,1	Rp1146,9	92
2015	Rp1489,3	Rp1240,4	83
2016	Rp1539,2	Rp1285,0	83
2017	Rp.1283,6	Rp1151,0	89

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), diantaranya adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para *stakeholder*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Lanis & Richardson, 2012).

Penelitian tentang hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya (Watson, 2011), (Lanis & Richardson, 2012) yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan, karena

salah satu tanggung jawab perusahaan adalah dimulai dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah (Dharma & Naniek, 2017).

Beberapa penelitian yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Annisa & Lulus, 2012) yang menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian (Manurung & Hutabarat, 2020) *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pada penelitiannya (Winata, 2014) bahwa *corporate governance* mampu menimbulkan efek pengaruh positif pada *tax avoidance*. (Rahmawati dkk., 2016) mengemukakan hal yang sama dalam penelitiannya. Namun hal tersebut berbeda dengan suatu penelitian yang telah dilakukan oleh (Sarasati & Asyik, 2018) bahwa *corporate governance* tidak mampu untuk menimbulkan suatu pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Purwanti yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan semakin besar pula beban penyusutan yang akan didapatkan dan semakin besar kemungkinan beban penyusutan akan mengurangi beban pajak perusahaan dalam rekonsiliasi fiskal. Hasil penelitian (S. M. Purwanti & Sugiyarti, 2017) (Sundari & Vita, 2017) dan (Noviyani & Dul, 2019) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Wijayanti dkk., 2017) yang menggunakan variabel independen *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*. Selain itu, terdapat tambahan variabel intensitas aset tetap dari penelitian (Noviyani & Dul, 2019). Berdasarkan penelitian (Wijayanti dkk., 2017) maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji :

1. Pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak
2. Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak
3. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak
4. Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak
5. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak
6. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
7. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Perusahaan

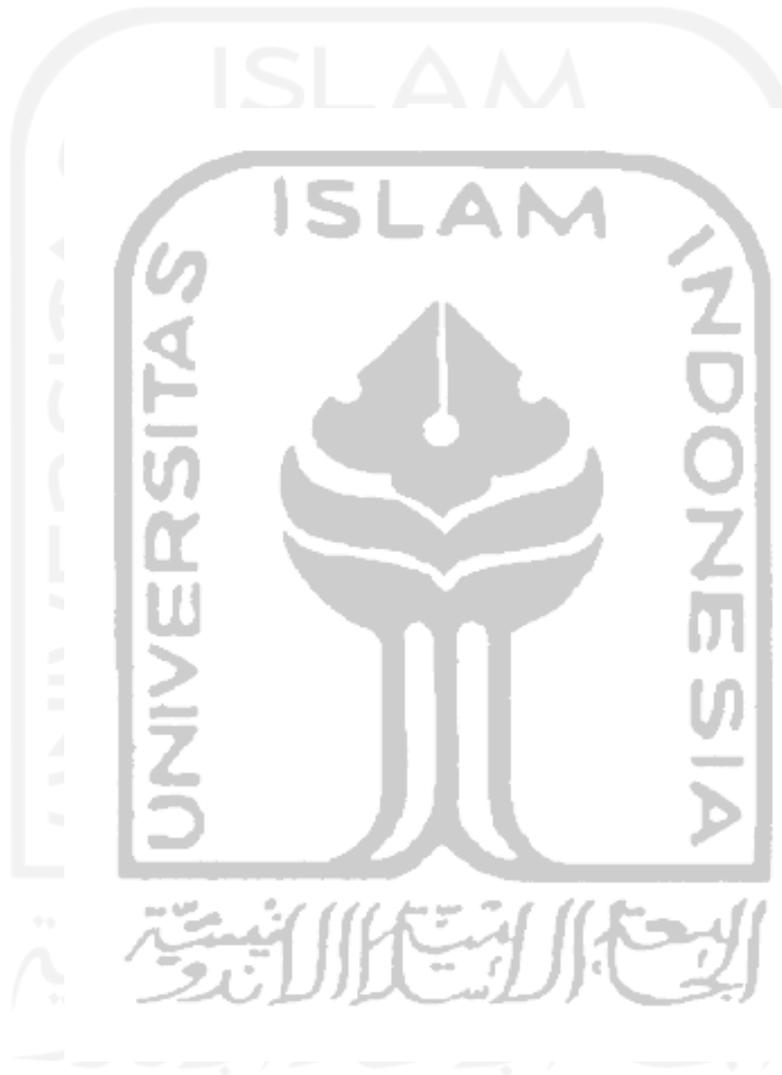
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengurangan pembayaran beban pajak serta sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan dalam praktik penghindaran pajak.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi pemerintah dalam memperbaharui peraturan perpajakan serta dalam membuat kebijakan – kebijakan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, referensi, bukti empiris serta bermanfaat dalam pengembangan praktek perpajakan kepada peneliti lainnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dalam setiap organisasi individu (*agent*) akan berperan sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau sekelompok individu lainnya (*principal*). Keduanya memiliki hubungan disebut dengan *the principal-agent relationships* akan terjadi dalam organisasi perusahaan antara pemegang saham (*stockholders*) sebagai *principal* dengan pengelola (*managers*) sebagai *agent* dalam hubungan tersebut. Adanya perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Serta antara satu penugasan dengan penugasan lainnya. Tingkatan perbedaan karakteristik struktur dan mekanisme yang diadopsi oleh setiap organisasi tersebut ditentukan oleh bentuk ketidaksimetrisan informasi (*information asymmetry*) (Lukviarman, 2016).

2.1.2 *Stakeholder Theory*

Stakeholder adalah pihak internal maupun eksternal yang memiliki relasi, baik bersifat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan. Stakeholder mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat dikendalikan oleh stakeholder, karena stakeholder mempunyai pengaruh

dalam pemakaian sumber sumber ekonomi perusahaan (Wardani dkk., 2016).

Menurut (Chariri & Ghazali, 2007) Teori Stakeholder memaparkan bahwa perusahaan tidak hanya entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus berguna bagi seluruh *stakeholder* (pemegang saham, pemerintah, kreditor, supplier, konsumen, masyarakat, analis, dan pihak lain). Manajemen memiliki bahan pertimbangan yaitu kelompok stakeholder dalam mengungkap atau tidak suatu informasi dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan suatu penciptaan nilai akibat dampak dari kegiatan –kegiatan yang dilakukan serta mengurangi kerugian yang mungkin timbul bagi *stakeholder*.

2.1.3 Legitimacy Theory

Teori legitimasi didasarkan pada peristiwa kontak sosial antara organisasi dengan masyarakat. Di masyarakat terdapat norma atau nilai sosial, sehingga organisasi yang terjun langsung harus memperhatikan norma norma tersebut. Teori ini memaparkan bahwa organisasi bagian dari masyarakat. Apabila aktivitas organisasi dapat diterima oleh masyarakat

Maka aktivitas tersebut sesuai dengan norma sosial sehingga organisasi mendapatkan pengakuan yang legitimate (sah) dari masyarakat. Menurut Grey et al (1995) dalam penelitian (Ratmono & Winarti, 2015)

ketika terjadi ketidaksesuaian dengan nilai-nilai pada masyarakat maka terjadi sebuah ancaman pada legitimasi masyarakat.

Untuk menunjukkan nilai perusahaan telah sesuai dengan norma sosial perusahaan tersebut beroperasi maka dilakukan aktivitas corporate social responsibility. Berdasarkan teori ini, mengungkapkan CSR yang dilakukan perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Manfaat dari legitimasi ini perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Menurut Deegan dan Brown (1996) dalam penelitian (Ratmono & Winarti, 2015).

2.1.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan pelaku bisnis selaku wajib pajak melakukan segala bentuk kegiatan yang masih dalam lingkup peraturan-peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang untuk meminimalisir jumlah pajak yang terhutang dari tahun sekarang ke tahun yang akan datang sehingga dapat memperbaiki arus kas perusahaan (Diaz, 2012). Praktek penghindaran pajak akan disebut legal dan dapat diterima apabila aktivitas tersebut sesuai berdasarkan undang-undang (Astuti & Aryani, 2016). Dalam penelitian penghindaran pajak dapat diukur dengan *Effective Tax Rates* (ETR) atau Tarif Pajak Efektif. Perhitungan ETR adalah beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Total beban pajak diperoleh dari penjumlahan beban pajak kini dan

beban pajak tangguhan. Perolehan laba sebelum pajak adalah laba yang diperoleh perusahaan dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan.

2.1.5 Corporate Social Responsibility

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Artinya, pelaksanaan sudah diatur dalam undang undang. Sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan. Karena pada dasarnya tujuan perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit saja melainkan memiliki kepekaan dan perhatian kepada lingkungan dalam bentuk tanggung jawab sosial guna mewujudkan kesejahteraan sosial (Marthin dkk., 2017).

2.1.6 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah tata kelola yang baik pada organisasi, di dalamnya dijalankan oleh sebuah sistem yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh pemangku kepentingan (Effendy, 2009). Dalam konsep ini, prioritas pemegang saham adalah menggunakan haknya untuk mendapatkan informasi dengan benar dan tepat waktu, serta perusahaan

berkewajiban untuk mengungkapkan informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders secara akurat, tepat, dan secara transparan (Suwandi *et. al* 2018).

Guna merealisasikan konsep dan penerapan *good corporate governance* yang efektif, terdapat lima konsep yang telah dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) antara lain :

Prinsip Good Corporate Governance

1. *Transparancy* (Keterbukaan)

Meliputi unsur pengungkapan dan perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang material dan mudah diakses oleh para *stakeholders*. Adanya transparansi agar perusahaan tetap menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan akan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Jika ada masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, perusahaan mitra, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan lainnya maka diperlukan inisiatif dari perusahaan untuk mengungkapkan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas hasil kinerjanya secara terbuka dan wajar. Maka, perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Syarat

yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan adalah dengan menerapkan akuntabilitas.

3. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga kesinambungan usaha mampu terpelihara dalam jangka waktu yang lama dan terwujudnya pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

4. *Independency* (Kemandirian)

Perusahaan dalam mengelola usahanya harus secara mandiri sehingga disetiap elemen perusahaan beserta jajarannya tidak diperbolehkan saling mendominasi dan tidak diintervensi pihak lain.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Menerapkan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan. Dengan menganut asas kewajaran dan kesetaraan. Asas ini diwujudkan untuk melindungi pemegang saham minoritas.

2.1.7 Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak ada relasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan keluarga yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen atau

bertindak sekehendanya demi kepentingan perusahaan (M. Sari M, R. & Kurniasih, 2013). Jumlah komisaris independen diwajibkan paling kurang dari tiga puluh persen dari seluruh anggota dewan komisaris. Apabila jumlah dewan komisaris independen semakin banyak maka semakin baik karena komisaris independen menjalankan peran dengan melakukan monitoring terhadap perilaku para direktur, sehingga aktivitas penghindaran pajak dapat ditekan rendah.

2.1.8 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh jajaran dewan komisaris dengan tujuan membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. dalam hal pemeriksaan, pengecekan, serta pengawasan dalam pelaksanaan kinerja pelaporan keuangan dan pengauditan internal maupun eksternal dalam perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 pasal 4, keanggotaan komite audit minimal terdiri dari tiga orang. Dari tiga anggota tersebut, ada yang berasal dari komisaris independen dan lainnya bersifat independen yang merupakan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik (OJK, 2015).

Menurut penelitian (Damayanti & Tridahus, 2015), peran komite audit adalah membantu seluruh komisaris dalam menjalankan tugasnya terkait memastikan pelaporan keuangan dibuat secara wajar sesuai standar akuntansi keuangan, struktur pengendalian yang baik, auditor internal dan eksternal melaksanakan audit sesuai standar audit yang telah ditetapkan,

serta manajemen menindaklanjuti terkait temuan audit yang dilakukan oleh manajemen. Oleh karena itu, pengawasan mekanisme perbaikan kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen dapat diawasi oleh komite audit. Karena diantara keduanya memiliki tingkatan informasi yang berbeda.

2.1.9 Kualitas audit

Prinsip transparansi merupakan salah satu komponen penting dalam corporate governance. Transparansi merupakan prasyarat untuk mengungkapkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) secara akurat. Perusahaan berkewajiban menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya agar terjaga objektivitas dalam menjalankan usaha (Maraya & Reni, 2016).

Menurut penelitian (Annisa & Lulus, 2012), memaparkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* (Price Waterhouse Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young – EY) sudah terbukti mengaudit secara profesional dan berintegritas, sehingga dalam aktivitas perpajakan memiliki tingkat kecurangan yang rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Non - Big Four*.

2.1.10 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan seperti direksi, komisaris, manajer, serta karyawan yang memiliki kedudukan sebagai pemilik saham, yang diukur berdasarkan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Menurut penelitian (Maraya & Reni, 2016) memaparkan bahwa dalam pengambilan keputusan, manajemen akan bersikap hati-hati karena, akan berpengaruh langsung terhadap dirinya sendiri sebagai pemegang saham. Jika semakin besar prosentase kepemilikan saham, maka manajemen akan lebih bersemangat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan kepatuhannya termasuk menghindari aktivitas penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial yang meningkat merupakan tercapainya cara meminimalkan masalah keagenan di perusahaan.

2.1.11 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki otoritas untuk melakukan pengontrolan atas hasil kinerja manajemen (Ngadiman & Christiany, 2014). Maka kepatuhan dan kinerja manajemen terus meningkat seiring dilakukan tindakan oleh kepemilikan institusional.

Semakin besar kepemilikan institusional keuangan maka akan semakin banyak dukungan dari institusi keuangan tersebut karena adanya pengawasan manajemen dan potensi mentaati peraturan perpajakan lebih besar, karena pengaruh dorongan yang diberikan. Investor institusional memiliki peranan dalam pengambilan keputusan maka secara langsung akan mendorong manajemen untuk mentaati peraturan dari pemerintah sehingga pajak dipatuhi oleh perusahaan (Hanum & Zulaikhah, 2013).

2.1.12 Intensitas Aset Tetap

Menurut PSAK No 16 Tahun 2007 definisi aset tetap adalah aset berwujud yang:

- (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Intensitas aset tetap menurut (Mulyani & Meisiska, 2016) merupakan proporsi dalam aset tetap dimana terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban penyusutan untuk mengurangi penghasilan yang timbul dari aset tetap. Apabila aset tetap semakin besar maka laba yang diperoleh akan semakin kecil, karena dalam aset tetap terdapat beban penyusutan yang menyebabkan laba berkurang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan, dengan penelitian penghindaran pajak disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian & Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Obyek	Alat Analisis	Temuan Kajian
1.	(Maraya & Reni, 2016)	Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap <i>Tax avoidance</i> , Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang dan CPO	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi komisaris independen • Kualitas audit • Kepemilikan institusional • Kepemilikan manajerial • Pengungkapan tanggung jawab social Variabel dependen : <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran pajak 	Perusahaan Tambang Dan Perusahaan Kelapa Sawit Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2014.	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> • Proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> • Corporate social responsibility disclosure berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.
2.	(L. Sari L, P. & Agustinus, 2017)	Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • Corporate Social 	Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2013-2015.	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • CSR aspek ekonomi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak • CSR aspek

		Perusahaan	Responsibility <ul style="list-style-type: none"> • CSR Dimensi Ekonomi • CSR Dimensi Sosial 			sosial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3.	(Annisa & Lulus, 2012)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Corporate Governance - Kepemilikan Institusional - Dewan Komisaris - Prosentase Dewan Komisaris Independen - Jumlah Dewan Komisaris - Kualitas Audit - Komite Audit Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax avoidance</i> 	Seluruh Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2008.	Analisis Regresi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> • Dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> • Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> • Komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> • Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

4.	(Noviyani & Dul, 2019)	Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Return On Assets • Leverage • Ukuran Perusahaan • Intensitas Aset Tetap • Kepemilikan Institusional <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak 	Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017.	Analisis Regresi	<ul style="list-style-type: none"> • Return On Asset, Leverage, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak • Ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
5.	(Wardani dkk., 2016)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> , Dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>) (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan • Leverage • Intensitas Modal • Komisaris Independen • Komite Audit • CSR <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak 	Seluruh Perusahaan Go Public Di BEI Selama Tahun 2014-2016.	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan dan komite audit secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • Leverage, intensitas modal, komisaris independen, dan CSR secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

		(BEI) periode 2014-2016)				
6.	(Wijayanti dkk., 2017)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan • Leverage • Komsaris Independen • Komite Audit • Corporate Social Responsibility <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran pajak. 	Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Tahun 2012-2014	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Leverage, Komisar independen, Komite audit dan Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan • Ukuran perusahaan dan Intensitas modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
7.	(Sundari & Vita, 2017)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal dan <i>Corporate Governanace</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konservatisme Akuntansi • Intensitas Aset Tetap • Kompensasi Rugi Fiskal • Kepemilikan Manajerial • Kualitas Audit <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax avoidance</i> 	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2013 – 2015.	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Konservatisme akuntansi dan Kepemilikan manajerial berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. • Variabel Intensitas aset tetap, Kompensasi rugi fiskal dan Kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.

8.	(S. Purwanti M. & Listya, 2017)	Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, Dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax avoidance</i>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensitas Aset Tetap • Pertumbuhan Penjualan • Koneksi Politik <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax avoidance</i> 	Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Selama Tahun 2012-2016.	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> • Pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> • Koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
9.	(Wijayani, 2016)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, <i>Corporate Governance</i> Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • Kepemilikan Keluarga • Corporate Governance • Struktur Kepemilikan <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak 	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. • Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. • Komisaris Independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. • Kepemilikan Institusional berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
10.	(Jefri & Yaumil, 2019)	Pengaruh Good Corporate	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan 	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan manajerial, Kualitas

		<p>Governance Dan Return On Assets Terhadap <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Institusional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Manajerial • Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) • Komite Audit • Kualitas Audit Eksternal • Return On Assets <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak 	<p>Di BEI Selama Tahun 2014-2016.</p>		<p>Audit, dan <i>Return On Assets</i> berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i>
11.	(Yulyanah & Sri, 2019)	<p><i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tingkat laba • tingkat utang • kepemilikan institusional <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak yang diukur dari <i>book tax difference</i> 	<p>Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Selama Tahun 2013-2017.</p>	<p>Analisis Regresi Data Panel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keuntungan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi, maka beban pajaknya tinggi juga sehingga perusahaan akan melakukan efisiensi beban pajak dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. • Tingkat utang tidak berpengaruh terhadap

						<p>penghindaran. Perusahaan tidak tergantung pada utang untuk membiayai operasionalnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan kepemilikan saham institusional yang tinggi akan mengurangi tingkat penghindaran pajak karena investor institusional mampu mengawasi setiap tindakan yang akan dilakukan pihak manajemen.
12.	(Astuti & Aryani, 2016)	Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran penghindaran pajak menggunakan ETR dan CETR. 	Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014	-	Tren penghindaran pajak yang tinggi dilihat dari nilai ETR dan CETR nya. Semakin kecil nilai ETR dan CETR menandakan bahwa terjadi perilaku penghindaran

						<p>pajak oleh perusahaan yang semakin besar. beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah baru senilai 35%, pembayaran kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan hanya mencapai 40% dan beban pajak tanggungan yang dibayarkan kepada pemerintah atas total asset yang dimiliki perusahaan hanya berkisar 5%. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa antara tahun 2001-2014 terjadi tren penghindaran pajak yang tinggi.</p>
13.	(N. L. P. P. Dewi & Naniek, 2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan • <i>Leverage</i> • Profitabilitas • <i>Corporate Social Responsibility</i> <p>Variabel Dependen :</p>	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2015	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak. • variabel <i>leverage</i> berpengaruh secara negatif pada penghindaran

			<ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak 			<ul style="list-style-type: none"> pajak. • Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak. • Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak.
14.	(Utari & Ni Luh, 2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada <i>Tax avoidance</i>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corporate Governance <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi Komisaris Independen - Keberadaan Komite Audit • Profitabilitas • Koneksi politik <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran pajak 	Perusahaan Industri Properti Dan <i>Real Estate</i> Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012–2015	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit merupakan proksi dari <i>corporate governance</i> • Berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada <i>tax avoidance</i>. Profitabilitas Diukur menggunakan <i>return on assets</i> berpengaruh negatif dan signifikan pada <i>tax avoidance</i> • Koneksi politik yang diukur

						dengan variabel <i>dummy</i> berpengaruh positif dan signifikan pada <i>tax avoidance</i> .
15.	(Dharma & Naniek, 2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSR diukur dengan <i>CSR disclosure</i> dengan indikator GRI G3.1. • Variabel <i>capital intensity</i> diukur menggunakan rasio intensitas aset tetap. <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak 	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2015	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel CSR berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i>. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan suatu perusahaan akan menurunkan praktek penghindaran pajak. <p><i>Capital Intensity</i> masing-masing dan positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Ini menunjukkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan praktek penghindaran pajak.</p>

Sumber : Data Sekunder, diolah

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax avoidance*

Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan kepada pemerintah. Dilakukannya pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Dengan berkontribusi maka, perusahaan mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Menurut teori legitimasi, adanya kontak sosial antara organisasi dengan masyarakat terhadap norma atau nilai sosial. Dimana perusahaan bagian dari lingkungan sosial. Perusahaan dalam melakukan kegiatan sebisa mungkin untuk mendapatkan legitimasi yang sah agar diterimanya kegiatan oleh masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut penelitian Lanis & Richardson dilakukannya penghindaran pajak pada perusahaan maka turunya reputasi dimata stakeholder. Bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para stakeholder adalah melakukan kegiatan CSR. Dengan demikian, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Lanis & Richardson, 2012). Sehingga sikap terhadap CSR mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Lanis & Richardson, 2012) dan (Sandra dan Anwar, 2017) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas dan hasil

penelitian terdahulu, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka diharapkan semakin rendah tingkat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan:

H1 : *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak ada relasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham, serta tidak adanya hubungan antar rekan bisnis. Dewan komisaris berwenang sebagai monitoring dan memberikan arahan kepada direksi guna memastikan jalannya tugas agar profitabilitas tetap terjaga (Puspita & Puji, 2014). Keberadaan komisaris independen adalah sebagai penengah dalam pengambilan keputusan dalam hal perlindungan terhadap pemegang saham minoritas serta pihak pihak lain yang terlibat. Semakin banyak proporsi komisaris independen dapat mempengaruhi efektifitas aktivitas monitoring di dalam perusahaan. Maka aktivitas monitoring yang dilakukan dewan komisaris akan meminimalisir kecenderungan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Wijayani, 2016).

Menurut (Minnick & Noga, 2010), komisaris independen juga memiliki peran penting dalam menangani penghindaran pajak. Oleh karena itu, yang terpilih sebagai komisaris independen adalah orang yang berkompoten sesuai bidangnya, memiliki wawasan yang luas serta berpengalaman dalam menangani perusahaan.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Sandy & Lukviarman 2015) (Wijayani, 2016), dan (Diantari & Ulupui, 2016) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan:

H2 : Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax avoidance*

2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*

Komite audit terdiri dari tiga anggota yang dibentuk oleh jajaran dewan komisaris. Terpilihnya komite audit secara independen dengan syarat orang yang berkompeten dibidang akuntansi dan keuangan. Tugas utama komite audit adalah memeriksa dan monitoring pelaksanaan kinerja pelaporan keuangan dan pengauditan internal dan eksternal pada perusahaan. Menurut (Utari & Ni Luh, 2017), dengan semakin tingginya kehadiran komite audit, maka terjadi peningkatan kualitas perusahaan dan praktek penghindaran pajak dapat ditekan. Komite audit berperan penting yaitu mendorong wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Serta dapat memperkecil kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Utari & Ni Luh, 2017) dan (Diantari & Ulupi, 2016) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan:

H3 : Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax avoidance*.

2.3.4 Perpengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax avoidance*

Kualitas audit merupakan segala sesuatu kemungkinan yang terjadi ketika laporan klien diaudit dan melaporkan dalam laporan keuangan auditan. Salah satu prinsip good corporate governance adalah transparansi. Fungsi ini sebagai pedoman auditor guna menangani terjadinya asimetris informasi pada manajemen dan pemegang saham yang berkaitan dengan hal hal perpajakan pada pasar modal (Sundari & Vita, 2017).

Kualitas audit bergantung pada bagaimana auditor bekerja. Profesionalitas, sifat yang independen, serta berkompeten yang dimiliki auditor akan menghasilkan kualitas audit yang berkualitas sehingga auditor dapat mempertahankan reputasinya. Akan berpengaruh terhadap investor, jadi lebih percaya atas informasi yang diberikan dan tentunya tindakan penghindaran pajak dapat dicegah (Tuanakotta, 2007). Apabila kualitas audit baik, semakin kecil tindakan penghindaran pajak karena berkualitasnya audit yang bebas dari kecurangan (Maraya & Reni, 2016).

Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Maraya & Reni, 2016), Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018), dan (Sari & Devi, 2018) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan:

H4 : Kualitas Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax avoidance*.

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan manajerial adalah manajemen perusahaan yang terdiri dari direksi, komisaris, manajer, dan karyawan yang memiliki saham aktif dan

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan pihak manajemen harus bersikap lebih hati-hati karena apabila keliru dalam bertindak akan berdampak langsung kepada dirinya sebagai pemegang saham (Maraya & Reni, 2016).

Peningkatan kepemilikan manajerial oleh perusahaan bertujuan untuk mensterilkan keberadaan manajer dengan pemegang saham. Apabila manajer dan pemegang saham memiliki kepentingan yang sejajar, maka akan meminimalisir masalah agensi di perusahaan. Menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam penelitian Retno (2012), Jumlah kepemilikan manajemen yang lebih besar dapat mengurangi praktek penghindaran pajak. Karena manajer dalam memutuskan kebijakan tentang perpajakan tidak bersifat agresif namun lebih mempertimbangkan kelangsungan usahanya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Fadhila, Pratomo, dan Yudowati (2017) dan (Rahmawati, et al., 2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan:

H5 : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax avoidance*.

2.3.6 Pengaruh Kepemilikan Instiusional Terhadap *Tax avoidance*

Pengelompokan struktur kepemilikan saham terdiri dari dua golongan yaitu pemegang saham institusi dan pemegang saham perorangan. Direktur dan eksekutif tergolong pemegang saham perorangan. Kepemilikan instiusional yaitu pemilik saham dari kalangan institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, jamsostek, perusahaan asuransi perbankan, serta dana pensiun (N. N. Dewi & Jati, 2014). Pemegang saham mayoritas pada

perusahaan adalah yang memiliki kekayaan sumber daya pada umumnya yaitu investor institusional yang diharapkan mampu menjalankan mekanisme pengawasan terhadap manajemen dengan baik sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih untuk mentaati peraturan perpajakan. Investor institusional berperan aktif dalam memonitor, mendisiplinkan dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan guna mendorong manajemen untuk mentaati peraturan pemerintah sehingga perusahaan taat akan pajak.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Maraya & Reni, 2016), (Wijayani, 2016), (Yulyanah & Sri, 2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan:

H6 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Terhadap Tax Avoidance.

2.3.7 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax avoidance*

Intensitas aset tetap adalah perusahaan berinvestasi lebih besar pada aset tetap diantaranya peralatan, mesin, bangunan, pabrik, dan property lainnya. Aset tetap akan mengalami penyusutan yang tercatat dalam laporan keuangan disebut dengan biaya penyusutan. Proporsi intensitas aset tetap yang besar akan menimbulkan beban depresiasi atas aset tetap yang besar pula. Menurut penelitian (Sundari & Vita, 2017), dalam manajemen pajak, intensitas aset tetap berpotensi mengurangi beban pajak perusahaan karena beban depresiasi memiliki sifat deductible expense yang berguna untuk mengurangi laba perusahaan sebagai dasar pengenaan pajak. Dalam konflik

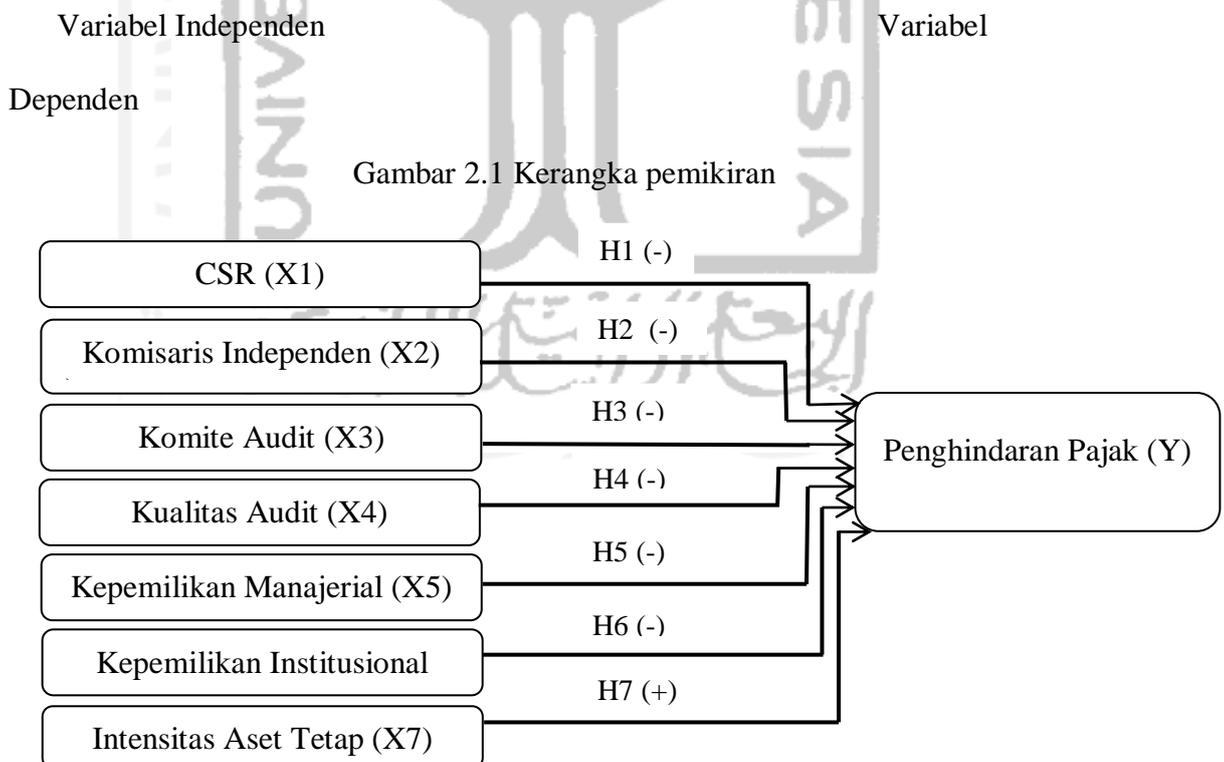
keagenan, tingginya intensitas aset tetap digunakan manajer sebagai penghindaran beban pajak syaratnya memperbanyak investasi pada aset tetap sehingga laba perusahaan dapat diraih secara maksimal serta kompensasi kinerja manajer terwujud.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Rifai & Suci, 2019) dan (Budianti & Curry, 2018) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan:

H7 : Intensitas Aset Tetap Berpengaruh Positif Terhadap *Tax avoidance*.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data populasi yang digunakan dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur selama periode 2016 – 2018.

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, teknik pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan subjek peneliti.

Kriteria dari sampel yang ditetapkan oleh peneliti adalah :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 dan memiliki tahun fiskal yang berakhir 31 desember.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap tahun 2016 – 2018 dan tidak delisting selama periode pengamatan penelitian
3. Dalam – publikasi – laporan keuangan perusahaan manufaktur menggunakan satuan mata uang rupiah.
4. Perusahaan manufaktur selama 2016 – 2018 tidak menanggung kerugian.

5. Perusahaan manufaktur memiliki kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengakses website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada laporan tahunan perusahaan manufaktur selama periode 2016 – 2018 dengan menggunakan cara observasi.

3.3. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependen disebut juga variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini variabel dependennya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel- variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel dependen. Variabel independennya adalah *corporate social responsibility*, *good corporate governance*, dan intensitas aset tetap.

3.3.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan guna meminimalisir atau bahkan menghilangkan beban perpajaknya dengan cara legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut

(Astuti & Aryani, 2016), model penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah menggunakan *Effect Tax Rates* (ETR). Dalam berbagai riset perpajakan, salah satunya penghindaran pajak seringkali menggunakan model ETR. ETR merupakan alat ukur seberapa besar perusahaan dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Penghitungan ETR dengan rumus rasio total beban pajak penghasilan terhadap *pre-tax income*. Penjumlahan antara beban pajak kini dan beban pajak tangguhan adalah hasil dari beban pajak penghasilan. Perolehan laba bersih sebelum dikurangi pajak penghasilan adalah hasil dari *pre-tax income*. Penghindaran pajak oleh perusahaan semakin kecil maka nilai ETR semakin besar dan sebaliknya tindakan penghindaran pajak semakin besar maka nilai ETR semakin kecil. Angka lebih dari 0 dan kurang dari 1 adalah kisaran nilai ETR. (Astuti & Aryani, 2016).

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penghindaran pajak ini mengacu pada penelitian (Astuti & Aryani, 2016), (Wijayanti dkk., 2017), (S. M. Purwanti & Sugiyarti, 2017), (L. Sari L, P. & Agustinus, 2017), (Wardani dkk., 2016), dan (Dharma & Naniek, 2017).

Variabel penghindaran pajak dihitung dengan rasio :

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

Keterangan :

Tax expense *i, t* : penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan

Pretax income *i, t* : laba bersih sebelum dikurangi pajak penghasilan.

3.3.2 Corporate Social Responsibility

Pengukuran variabel CSR menggunakan *Global Reporting Initiative (GRI) G4* berjumlah 91 indikator kinerja dengan kategori (ekonomi, lingkungan, sosial). Indeks pengungkapan CSR pada perusahaan yang semakin besar, maka pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat diperoleh melalui pengungkapan CSR dalam *annual report* maupun *sustainability report*. Rumus yang digunakan yaitu :

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel corporate social responsibility ini mengacu pada penelitian (Heryanto & Juliarto, 2017), (Wijayanti dkk., 2017), (Wardani dkk., 2016), (Dharma & Naniek, 2017), dan (N. L. P. P. Dewi & Naniek, 2017).

Variabel *corporate social responsibility* dapat diukur dengan rasio :

$$CSR_{ij} = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan :

CSR_{ij} : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i

$\sum X_{yi}$: nilai 1 = jika item yi diungkapkan; 0 = Jika item yi tidak diungkapkan

n_i : Jumlah item untuk perusahaan sebesar 91 indikator

3.3.3 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota yang menjabat dewan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga dengan para pemegang saham pengendali. Pengukuran dengan menggunakan skala rasio. Menurut (Permana, 2015), Skala rasio adalah hasil penjumlahan komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang terafiliasi dan tidak terafiliasi. Untuk melihat berapa banyak jumlah dewan komisaris independen dan anggota dewan komisaris terdapat pada laporan keuangan yang telah diaudit yang sudah terpublikasi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel komisaris independen ini mengacu pada penelitian (Wijayanti dkk., 2017), (Wardani dkk., 2016), (Maraya & Reni, 2016) (Annisa & Lulus, 2012), dan (Utari & Ni Luh, 2017).

Variabel komisaris independen dihitung menggunakan rasio :

$$\text{INDP} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

3.3.4 Komite Audit

Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah seseorang yang berkompeten, bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, hal ini menjadikan komite audit berperan sebagai pembantu dewan komisaris dalam pelaksanaan audit,

manajemen risiko, dilaksanakannya corporate goverance di perusahaan serta memperkuat pengawasan atas proses pelaporan keuangan sehingga harapnya kualitas laporan keungan dapat meningkat dengan keberadaan komite audit. (Jefri & Khoiriyah, 2019). Variabel ini diukur berdasarkan jumlah komite audit dalam perusahaan dengan mengitung banyaknya anggota komite audit pada perusahaan yang dijadikan sampel disetiap tahunnya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel komite audit ini mengacu pada penelitian (Annisa & Lulus, 2012), (Wijayanti dkk., 2017), dan (Wardani dkk., 2016).

Variabel komite audit dapat dihitung dengan rasio :

$$KOMA = \sum \text{Komite Audit}$$

3.3.5 Kualitas Audit

Pengukuran kualitas audit dapat ditentukan dengan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Terdapat dua KAP yaitu KAP The Big Four (*PriceWaterhouseCooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y*) dan KAP Non The Big Four. Jika perusahaan yang dijadikan sampel diaudit oleh KAP The Big Four maka, lebih independen, professional, serta berkualitas. Kredibilitasnya laporan keuangan dapat ditentukan dari kualitas audit. Menurut (Annisa & Lulus, 2012), variabel ini diukur dengan skala nominal melalui variabel dummy artinya, untuk perusahaan yang telah

diaudit oleh KAP The Big Four diberi angka 1, diberi angka nol untuk perusahaan yang telah diaudit oleh KAP Non Big Four.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas audit ini mengacu pada penelitian (Maraya & Reni, 2016), (Sundari & Vita, 2017), dan (Jefri & Khoiriyah, 2019).

3.3.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan besarnya saham yang dimiliki oleh manajemen yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan yang terdiri dari komisaris dan direksi. Menurut Fadhila, (2017) adanya kepemilikan manajerial membuat kepentingan pemegang saham dan kepentingan pihak manajer menjadi selaras maka terdorongnya manajemen untuk melakukan tindakan sejalan dengan keinginan pemegang saham sehingga meningkatkan kinerjanya dan bertanggung jawab guna mewujudkan kemakmuran pemegang saham. Variabel ini diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki manajer dan total saham yang beredar oleh perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepemilikan manajerial ini mengacu pada penelitian (Sundari & Vita, 2017), dan (Jefri & Khoiriyah, 2019).

Kepemilikan manajerial menggunakan unit ukuran satuan desimal. Dapat dihitung menggunakan rasio :

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Manajer}}{\text{Jumlah Saham Perusahaan}}$$

3.3.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan mayoritas yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, perbankan, jamsostek, dana pensiun, perusahaan investasi. (N. N. Dewi & Jati, 2014). Kepemilikan institusional yang besar kecilnya akan berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak. Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah perbandingan proporsi saham oleh institusi dan jumlah saham keseluruhan milik perusahaan. Unit pengukuran dalam satuan desimal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepemilikan institusional ini mengacu pada penelitian (Maraya & Reni, 2016), (Wijayani, 2016), (Noviyani & Dul, 2019), (Jefri & Khoiriyah, 2019) dan (Yulyanah & Sri, 2019).

Adapun rumus variabel kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Keseluruhan}}$$

3.3.8 Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap adalah memberikan informasi mengenai proporsi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Model pengukuran untuk menghitung intensitas aset tetap yaitu total aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur Intensitas aset tetap ini mengacu pada penelitian (Sundari & Vita, 2017), (S. M. Purwanti & Sugiyarti, 2017), dan (Noviyani & Dul, 2019).

Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dalam suatu penelitian mengenai variabel yang digunakan. Analisis ini memberikan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016).

3.4.2 Analisis Model Data Panel

Pemilihan model estimasi bertujuan untuk memilih model mana yang terbaik diantara model *common effect*, *fixed effect* atau model *random effect*. Untuk memilih model tersebut digunakan uji *chow* dan uji *Hausman* (Ghozali, 2016).

a. Uji *Chow*

Uji *Chow* dilakukan untuk menguji antara model *common effect* dan *fixed effect*. Keputusan yang diambil pada pengujian dengan uji *Chow* ini yaitu tolak H_0 ($p\text{-value} < 0,05$) dengan hipotesis:

H_0 : maka digunakan model *common effect*

H_a : maka digunakan model *fixed effects* dan lanjut uji *Hausman*

b. Uji *Hausmann*

Hasil pengujian dengan uji *Hausmann* dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Keputusan yang diambil pada pengujian *Hausman test* ini yaitu diterima H_0 ($p\text{-value} < 0,05$) dengan hipotesis:

H_0 : Model *random effect*

H_a : Model *fixed effect*

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji data yang telah diinput sebelum dilakukannya pengujian hipotesis. Tujuan uji asumsi klasik adalah mengetahui asumsi-asumsi dasar pada data. Dengan hal ini kejadian estimasi bias dapat dihindari. Terdapat empat jenis uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu memiliki distribusi normal atau tidak, sehingga apabila variabel

pengganggu memiliki distribusi normal, maka uji t dan F dapat dilakukan. Uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan *Chi Square Probability Distribution* (Gujarati & Dawn, 2012). Uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan *Chi Square Probability Distribution* (Gujarati & Dawn, 2012). Uji ini menggunakan uji Jarque-Bera LM atau *J-B test* yaitu dengan membandingkan nilai $J-B_{\text{statistik}}$ yang diperoleh dari komputer program Eviews dengan nilai χ^2_{tabel} . Metode Jarque-Bera dalam penelitian ini didasarkan pada sampel besar yang disesuaikan bersifat *asymptotic*. Uji Jarque-Bera ini menggunakan perhitungan skewness dan kurtosis dengan maka formulanya (Jarque & Bera dalam Widarjono, 2015) :

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right]$$

Di mana S = Koefisien Skewness dan k = Koefisien Kurtosis.

Kriteria pengujiannya adalah :

-Ho : $J-B < 2$ Normalitas (residual berdistribusi normal).

-Ha : $J-B \geq 2$ Non normalitas (residual tidak berdistribusi normal).

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui pengujian apakah model regresi ditemukan adanya korelasi terhadap variabel independen. Jika tidak terjadi korelasi antar variabel maka model regresinya baik. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (*VIF*). Apabila nilai

tolerance lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi tersebut baik dan tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016).

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian apakah terdapat korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Dalam pengamatan dengan menggunakan real time series biasanya terjadi penyimpangan. Sehingga akibatnya adanya autokorelasi ini koefisien R² akan menjadi salah. Guna mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (*DW-Test*). Model regresi dikatakan telah terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin-Watson lebih dari dua dan lebih kecil dari nilai 4-Du ($Du < \text{Durbin Watson} < 4-du$). (Widodo, 2019).

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Sedangkan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Disebut model regresi baik ketika terjadi *homokedastisitas* atau *tidak terjadi heteroskedastisitas*. Ketika nilai signifikansi lebih

besar dari 0,05 artinya model regresi bebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.4.4 Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan regresi data panel dengan bantuan alat *software e-views 8*. Hasil dari regresi menggunakan data panel, yaitu untuk pencapaian hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Keuntungan dalam menggunakan data panel yaitu; 1) Jumlah observasi data yang besar. 2) Meningkatnya derajat bebas. 3) Berkurangnya kolinearitas antar variabel-variabel penjelas. 4) Meningkatnya efisiensi dari penaksiran ekonometris. 5) Estimasi parameter yang lebih realible dan lebih stabil (Gujarati & Dawn, 2012).

Analisis data panel adalah penggabungan antara data *cross section* dengan data *time series*. Data *time series* merupakan data yang berdasarkan kurun waktu tertentu seperti: tahunan, kuartalan, bulanan. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang diambil pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan, maupun perorangan. Dalam penggunaan regresi data panel hanya menggunakan satu persamaan regresi saja. Regresi data panel akan memberikan hasil analisis yang lebih baik secara statistik karena penggabungan data *cross section* dan runtun waktu akan menghasilkan derajat kebebasan yang lebih besar sehingga dapat mengatasi masalah penghilangan variabel (*omitted variabel*) (Widarjono, 2015).

Penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh corporate social responsibility, good corporate governance, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 – 2018. Model pengujian hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen, yaitu Penghindaran Pajak

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_7$: Koefisien Regresi

X1 : Corporate Social Responsibility

X2 : Komisaris Independen

X3 : Komite Audit

X4 : Kualitas Audit

X5 : Kepemilikan Manajerial

X6 : Kepemilikan Institusional

X7 : Intensitas Aset Tetap

e : Error

3.4.52 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2016), uji koefisien determinasi memiliki tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan

satu. Dinyatakan bahwa kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas maka menunjukkan nilai R^2 yang kecil. Sedangkan nilai yang mendekati satu artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi berbagai variasi variabel dependen.

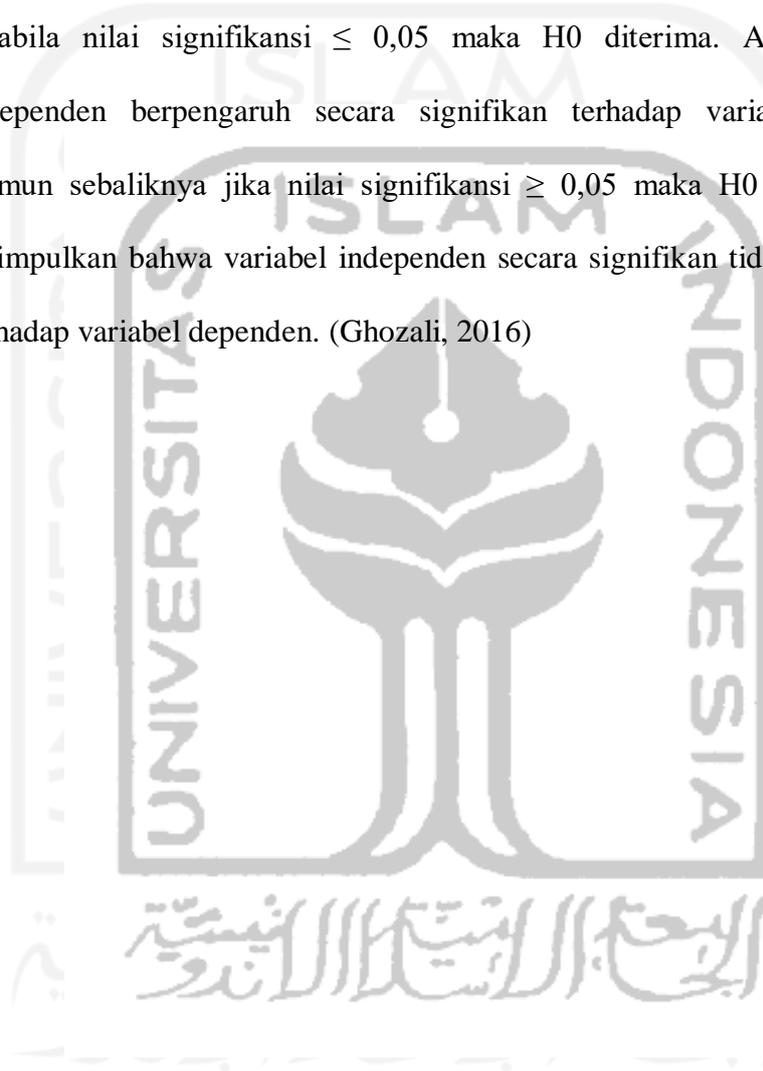
Adapun kelemahan penggunaan koefisien determinasi R^2 yaitu model yang ada variabel independen terjadi kebiasaan. Oleh karena itu para peneliti memberikan saran untuk menggunakan nilai adjusted R^2 saat mengevaluasi model regresi. Model adjusted R^2 dapat naik atau turun jika suatu variabel independen ditambahkan kedalam model.

3.4.6 Uji F / Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji F berguna untuk menilai kelayakan model. Dilakukannya uji F dengan melihat dari nilai F dan signifikansi. Dalam pengujian ini nilai prosentase signifikansi sebesar 5% (0,05). Apabila nilai signifikansi semakin rendah maka menunjukkan model yang dibangun memiliki kemungkinan kesalahan yang lebih rendah. Jika (Sig.<0,05) menunjukkan bahwa model regresi layak untuk digunakan dan hipotesis dapat diterima. Sebaliknya, apabila (Sig.> 0,05) dapat disimpulkan bahwa model regresi baik untuk digunakan dan hipotesis ditolak (Ghozali, 2016).

3.4.7 Uji Hipotesis (Uji t)

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka H_0 diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara signifikan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2016)



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis data dan hasil penelitian tentang analisis pengaruh *corporate social responsibility*, *good corporate governance*, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan teori yang telah peneliti jelaskan, peneliti menganalisa data yang telah peneliti kumpulkan.

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016 hingga 2018. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 35 perusahaan manufaktur dari total 144 perusahaan, sehingga data yang memenuhi kriteria adalah 105 data (35 perusahaan x 3 tahun). Kriteria dalam pemilihan sampel dapat dilihat tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Hasil Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar pas BEI selama periode 2016-2018.	144
2	Perusahaan melampirkan data laporan keuangan tahunan selama periode 2016-2018 secara berturut-turut.	(17)
3	Perusahaan tersebut dalam kondisi suspended atau delisting selama periode 2016-2018.	(6)
4	Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya tidak dalam mata uang rupiah selama periode 2016-2018.	(24)
5	Perusahaan tersebut mengalami rugi sebelum pajak pada periode 2016-2018 secara berturut-turut.	(28)
6	Data tidak sesuai kriteria	(34)
Jumlah perusahaan yang masuk kriteria		35
Total data selama 3 tahun (3x35)		105

4.2. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data sampel secara deskriptif. Statistik deskriptif yang dijelaskan meliputi rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum), dan standar deviasi (std. dev.) dari masing-masing variabel dalam penelitian. Berikut hasil statistik deskriptif yang terdiri dari variabel *tax avoidance* (ETR), corporate social responsibility (CSR), komisaris independen (INDP), komite audit (KOMA), kualitas audit (KUA), kepemilikan manajerial (KM), kepemilikan institusional (KI), dan intensitas aset tetap (IAT) yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	CSR	INDP	KOMA	KUA	KM	KI	IAT	ETR
Mean	0,376452	41,13338	3,028571	0,457143	10,73591	74,35072	0,453776	0,253178
Median	0,384615	37,50000	3,000000	0,000000	0,256652	84,81882	0,459170	0,253385
Maximum	0,769231	88,37000	5,000000	1,000000	89,45000	99,78000	0,761544	0,580871
Minimum	0,076923	16,66667	3,000000	0,000000	0,000000	1,153238	0,173987	0,015790
Std. Dev.	0,153552	12,05074	0,217377	0,500549	20,91217	27,25688	0,149612	0,095215
Skewness	0,308182	0,830270	8,066875	0,172062	2,473657	1,567448	0,051046	0,218115
Kurtosis	2,305269	4,555358	69,54597	1,029605	8,668357	4,581791	2,081110	4,588616

Sumber: Output EViews9, 2018.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Variabel Corporate Social Responsibility yang diprosikan melalui CSR pada sampel yang digunakan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,376452 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,153552, nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menandakan bahwa data yang digunakan merupakan data yang homogen atau tidak tersebar. Nilai tengah (median) memiliki nilai sebesar 0,384615,

nilai maximum pada variabel CSR memiliki nilai sebesar 0,769231 yaitu pada perusahaan Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) dan nilai minimum pada variabel CSR memiliki nilai sebesar 0,076923 yaitu pada beberapa perusahaan Cahaya Kalbar Tbk (CEKA).

2. Variabel Komisaris Independen yang diproksikan melalui INDP pada sampel yang digunakan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 41,13 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,217377, nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menandakan bahwa data yang digunakan merupakan data yang homogen atau tidak tersebar. Nilai tengah (median) memiliki nilai sebesar 3,00000, nilai maximum pada variabel INDP memiliki nilai sebesar 88,37 yaitu pada perusahaan Kalbe Farma Tbk (KBLM) dan nilai minimum pada variabel INDP memiliki nilai sebesar 3,000000 yaitu pada beberapa perusahaan Aneka Gas Industry Tbk (AGII).
3. Variabel Komite Audit yang diproksikan melalui KOMA pada sampel yang digunakan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 3,02 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,217377, nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menandakan bahwa data yang digunakan merupakan data yang homogen atau tidak tersebar. Nilai tengah (median) memiliki nilai sebesar 3,000000, nilai maximum pada variabel KOMA memiliki nilai sebesar 5,000000 yaitu pada perusahaan Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan nilai minimum pada variabel KOMA

memiliki nilai sebesar 3,000000 yaitu pada beberapa perusahaan salah satunya Akasha Wira Internasional Tbk (ADES).

4. Variabel Kualitas Audit yang diproksikan melalui KUA pada sampel yang digunakan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,457143 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,500549, nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata menandakan bahwa data yang digunakan merupakan data yang heterogen atau tersebar. Nilai tengah (median) memiliki nilai sebesar 0,000000, nilai maximum pada variabel KUA memiliki nilai sebesar 1,000000 yaitu salah satunya pada perusahaan Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI) dan nilai minimum pada variabel KUA memiliki nilai sebesar 0,000000 yaitu pada perusahaan salah satunya Betonjaya Manunggal Tbk (BTON).
5. Variabel Kepemilikan Manajerial yang diproksikan melalui KM pada sampel yang digunakan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 10,73591 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 20,91217, nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata menandakan bahwa data yang digunakan merupakan data yang heterogen atau tersebar. Nilai tengah (median) memiliki nilai sebesar 0,256652, nilai maximum pada variabel KM memiliki nilai sebesar 89,450000 yaitu pada perusahaan Betonjaya Manunggal Tbk (BTON) dan nilai minimum pada variabel KM memiliki nilai sebesar 0,000000 yaitu pada beberapa perusahaan salah satunya Astra Auto Part Tbk (AUTO).

6. Variabel kepemilikan institusional yang diproksikan melalui KI pada sampel yang digunakan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 74,35072 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 27,25688, nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menandakan bahwa data yang digunakan merupakan data yang homogen atau tidak tersebar. Nilai tengah (median) memiliki nilai sebesar 84,81882, nilai maximum pada variabel KI memiliki nilai sebesar 99,78000 yaitu pada perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan nilai minimum pada variabel KI memiliki nilai sebesar 1,153238 yaitu pada perusahaan Intan Wijaya Internasional Tbk (INCI).
7. Variabel intensitas asset tetap yang diproksikan melalui IAT pada sampel yang digunakan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,453776 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,149612, nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menandakan bahwa data yang digunakan merupakan data yang homogen atau tidak tersebar. Nilai tengah (median) memiliki nilai sebesar 0,459170, nilai maximum pada variabel IAT memiliki nilai sebesar 0,761544 yaitu pada perusahaan Aneka Gas Industry Tbk (AGII) dan nilai minimum pada variabel IAT memiliki nilai sebesar 0,173987 yaitu pada perusahaan Champion Pasific Indonesia Tbk (IGAR).
8. Variabel *Tax avoidance* yang diproksikan melalui ETR pada sampel yang digunakan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,253178 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,095215, nilai standar deviasi yang lebih

kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menandakan bahwa data yang digunakan merupakan data yang homogen. Nilai tengah (median) memiliki nilai sebesar 0,253385, nilai maximum pada variabel ETR memiliki nilai sebesar 0,580871 yaitu pada perusahaan Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI) dan nilai minimum pada variabel CETR memiliki nilai sebesar 0,015790 yaitu pada perusahaan Impack Pratama Industry (IMPC).

4.3. Analisis Model Data Panel

Pemilihan model estimasi bertujuan untuk memilih model mana yang terbaik diantara model *common effect*, *fixed effect* atau model *random effect*. Untuk memilih model tersebut digunakan uji *chow* dan uji *Hausman*.

4.3.1. Uji Chow

Uji *Chow* dilakukan untuk menguji antara model *common effect* dan *fixed effect*. Berikut ini hasil pengujian dengan uji *Chow*.

Tabel 4.3 Hasil Uji Model Menggunakan Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	4,944729	(34,64)	0,0000
Cross-section Chi-square	135,279358	34	0,0000

Sumber: data sekunder diolah 2018

Pada hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas F kurang dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ yang berarti signifikan dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$). Keputusan yang diambil pada pengujian dengan uji Chow ini yaitu tolak H_0 ($p\text{-value} < 0,05$) dengan hipotesis:

Ho : maka digunakan model *common effect*

Ha : maka digunakan model *fixed effects* dan lanjut uji *Hausman*

Berdasarkan hasil dari uji Chow, maka model yang tepat adalah model *fixed effect*, dan dilanjutkan dengan uji *Hausman* untuk memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau metode *random effect*.

4.3.2. Uji Hausmann

Hasil pengujian dengan uji *Hausmann* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Hasil Uji Model Menggunakan Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq.d.f	Prob.
Cross-section random	6,220004	6	0,3990

Sumber: data sekunder diolah

Pada perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai probability pada *test cross section random effect* memperlihatkan angka bernilai 0,3990 yang berarti tidak signifikan dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$). Keputusan yang diambil pada pengujian *Hausman test* ini yaitu diterima Ho (p-value < 0,05) dengan hipotesis:

Ho : Model *random effect*

Ha : Model *fixed effect*

Berdasarkan hasil dari pengujian *Hausman Test*, maka metode pilihan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *random effect*.

4.4. Pengujian Asumsi

Pengujian asumsi klasik dalam data penelitian ini meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi.

4.4.1. Uji Multikolinieritas

Permasalahan multikolinieritas telah dapat terselesaikan ketika menggunakan data panel atau dengan kata lain data panel menjadi solusi jika data mengalami multikolinieritas (Gujarati, 2003). Berikut ini hasil pengujian multikolinieritas dengan VIF.

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Coefficeient Variance	VIF
X1	0,003806	1,046839
X2	6,650007	1,125955
X3	0,001923	1,060051
X4	0,000369	1,078296
X5	2,800007	1,460517
X6	1,640007	1,417201
X7	0,004752	1,240899

Sumber: data sekunder diolah

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai VIF nilai kurang dari 10. Dengan demikian data panel dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah multikolinieritas.

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Untuk permasalahan heteroskedastisitas dapat diatasi dengan menggunakan metode GLS (*Generalized Least Square*). Metode GLS

telah diberikan perlakuan “*glejser*” untuk mengantisipasi data yang tidak bersifat homokedastisitas.

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji *Glejser*

Uji	Chi-Sq. Statistik	Prob.
Obs*R-squared	9,196509	0,2389

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai p-value lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4.3. Uji Normalitas

Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi normalitas adalah uji residual Jarque-Bera.

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Normalitas

Uji	Jarque-Bera Statistik	Prob.
Residuals	17,15825	0,000188

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti data tidak berdistribusi normal.

4.4.4. Uji Autokorelasi

Uji *autokorelasi* memiliki tujuan untuk mengetahui model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Autokorelasi bisa diukur menggunakan *Durbin Watson Test* yaitu untuk menentukan persamaan regresi ada autokorelasi ataupun tidak.

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Autokorelasi

Jumlah data	Variabel bebas	DU	4-DU	Durbin Watson
105	7	1,721	2,279	1,924204

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai $du < DW < (4-du)$ atau $1,721 < 1,924204 < 2,279$ artinya model regresi bebas dari masalah autokorelasi atau tidak ada autokorelasi antara kesalahan pengganggu.

4.5. Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian pada pemilihan metode estimasi dengan pengujian *Hausman* dan pengujian *Chow*, diperoleh data bahwa metode yang tepat adalah metode *random effect*.

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Regresi Data Panel *Random Effect Model*

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
Corporate Social Responsibility (X1)	-0,131787	-2,375703	0,0195
Komisaris Independen (X2)	0,000340	0,388118	0,6988
Komite Audit (X3)	-0,011012	-0,283281	0,7776
Kualitas Audit (X4)	0,015083	0,516261	0,6068
Kepemilikan Manajerial (X5)	0,000000553	0,100214	0,9204
Kepemilikan Institusional (X6)	0,000221	0,540875	0,5898
Intensitas Aset Tetap (X7)	0,106473	1,142626	0,2560
Adjusted R square <i>random effect</i>			0,000321
Adjusted R square <i>fixed effect</i>			0,587120
F-statistik			1,004768
Prob (F-statistik)			0,432770

Variabel dependen = Penghindaran Pajak (Y)

4.5.1. Pengujian Signifikansi Individual (uji t)

- 1) Nilai t statistic X1 sebesar -2,375703 dengan signifikan 0,0195 lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat pengaruh X1 terhadap Y dengan arah negatif.
- 2) Nilai t statistic X2 sebesar 0,388118 dengan signifikan 0,6988 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y dengan arah positif.
- 3) Nilai t statistic X3 sebesar -0,283281 dengan signifikan 0,7776 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y dengan arah negatif.
- 4) Nilai t statistic X4 sebesar 0,516261 dengan signifikan 0,6068 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh X4 terhadap Y dengan arah positif.
- 5) Nilai t statistic X5 sebesar 0,100214 dengan signifikan 0,9204 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh X5 terhadap Y dengan arah positif.
- 6) Nilai t statistic X6 sebesar 0,540875 dengan signifikan 0,5898 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh X6 terhadap Y dengan positif.
- 7) Nilai t statistic X7 sebesar 1,142626 dengan signifikan 0,2560 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh X7 terhadap Y dengan arah positif.

4.5.2. Pengujian Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel dengan metode *random effect* diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,000321. Namun berdasarkan hasil pengujian regresi data panel dengan metode *fixed effect* diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,587120 yang berarti pada model regresi ini, variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 58,71%, sedangkan 41,29% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai *adjusted R²* semakin mendekati 1, maka model ini cukup baik.

4.5.3. Pengujian Signifikansi secara Keseluruhan (Uji F)

Nilai F statistic sebesar 1,004768 dengan signifikan 0,432770 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4.6. Pembahasan (Interpretasi)

4.6.1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah negatif. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka diharapkan semakin rendah tingkat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara social cenderung untuk mencegah kegiatan penghindaran pajak. Aktivitas CSR merupakan suatu tindakan

yang tidak hanya memperhitungkan ekonomi tapi juga sosial, lingkungan dan dampak lain dari tindakan yang dilakukan perusahaan sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada stakeholder.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance* (Lanis & Richardson, 2012) (Hidayati & Fidiana, 2017). Penelitian ini juga mendukung studi sebelumnya bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi pengungkapan CSR akan menurunkan praktek penghindaran pajak pada perusahaan (Sandra & Anwar, 2018).

Beberapa pelaku bisnis yang mengaku bertanggung jawab secara sosial juga terlibat dalam aktivitas agresif pajak. Dalam dimensi ekonomi tidak dapat digabungkan dengan konsep CSR pada umumnya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. CSR dimensi ekonomi diperhitungkan dari penciptaan nilai melalui pengembangan produk, layanan dan model bisnis inovatif yang mengarah pada kualitas produk dan pekerjaan produktif yang lebih tinggi. Selain itu tingginya dimensi sosial yang diungkapkan maka semakin mudah diprediksi total aset perusahaan sehingga praktek penghindaran pajak akan menurun (Sari & Wibowo, 2017).

Perusahaan yang lebih bertanggung jawab sosial diharapkan bersifat kurang agresif terhadap pajak. Pengurangan beban pajak dapat dilihat sebagai suatu hal yang biasa dalam perusahaan, karena dengan

pengurangan biaya dapat meningkatkan profitabilitas, meningkatkan kekayaan pemegang saham. Tetapi pajak juga bergantung pada peraturan untuk mendukung program-program sosial pemerintah. Tindakan penghindaran pajak dilihat oleh beberapa orang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab secara sosial, sebagai perusahaan tidak membayar dengan adil. Mengingat bahwa perusahaan memiliki banyak stakeholder baik internal dan eksternal (Handayani, 2017).

Temuan penelitian menunjukkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara social cenderung untuk mencegah kegiatan penghindaran pajak. Adanya kesesuaiannya hasil analisis dengan Teori legitimasi, mengungkapkan CSR yang dilakukan perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Manfaat dari legitimasi ini perusahaan terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan serta dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Didukung dengan teori *Stakeholder* perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus berguna untuk *stakeholder* (pemegang saham, pemerintah, kreditor, supplier, konsumen, masyarakat, analis, dan pihak lain). Manajemen memiliki bahan pertimbangan membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan suatu penciptaan nilai akibat dampak dari kegiatan yang dilakukan serta mengurangi kerugian yang mungkin timbul bagi *stakeholder*.

4.6.2. Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah positif. Hasil ini menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh disebabkan karena banyak prosentase komisaris independen yang ada di perusahaan belum tentu dapat mempengaruhi penghindaran pajak, sedangkan perusahaan yang memiliki sedikit komisaris independen mungkin mampu dalam mempengaruhi melakukan penghindaran pajak. Menurut Minnick & Noga, komisaris independen memang memiliki peran penting dalam menangani penghindaran pajak. Namun seorang komisaris independen haruslah orang yang berkompeten sesuai bidangnya, memiliki wawasan yang luas serta berpengalaman dalam menangani perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak (Minnick & Noga, 2010).

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang diketahui Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Handayani, 2017). Hal tersebut dapat dikarenakan tidak semua anggota Dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Kemampuan Komisaris Independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat

mengendalikan Dewan Komisaris secara keseluruhan. Dewan Komisaris Independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan *tax avoidance* atau pajak agresif dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak (Handayani, 2017). Penelitian lain yang juga mendukung menunjukkan bahwa komisaris independen terhadap *tax avoidance* (Fadhila et al., 2017).

Penelitian ini tidak didukung dengan penelitian sebelumnya bahwa bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Maraya & Reni, 2016) dan (Wijayani, 2016). Keberadaan komisaris independen adalah sebagai penengah dalam pengambilan keputusan dalam hal perlindungan terhadap pemegang saham minoritas serta pihak pihak lain yang terlibat. Semakin banyak proporsi komisaris independen dapat mempengaruhi efektifitas aktivitas monitoring di dalam perusahaan. Maka aktivitas monitoring yang dilakukan dewan komisaris akan meminimalisir kecenderungan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Wijayani, 2016).

4.6.3. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah negatif. Artinya komite audit dalam perusahaan belum mampu melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang sama dengan rata-rata tiga anggota, sehingga tidak mampu mencerminkan apakah perusahaan mampu melakukan penghindaran pajak atau tidak. Sama halnya dengan

komisaris independen terpilihnya komite audit secara independen dengan syarat orang yang berkompeten dibidang akuntansi dan keuangan. Tugas utama komite audit adalah memeriksa dan monitoring pelaksanaan kinerja pelaporan keuangan dan pengauditan internal dan eksternal pada perusahaan.

Didukung dengan penelitian sebelumnya bahwa Damayanti & Susanto bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit sekurang-kurangnya tiga orang yang di angkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung, dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya pengalaman anggota (Damayanti & Susanto, 2015). Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian Oktamawati (2017) bahwa sedikit atau banyak jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya CETR (yang mengindikasikan tinggi atau rendahnya *tax avoidance*).

Didukung penelitian Dewi bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dimungkinkan bahwa kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara agresif bukan dari jumlah komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dapat disimpulkan, pada

kenyataannya jumlah komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia (Dewi, 2019).

4.6.4. Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak

Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Hal ini dapat dikarenakan baik perusahaan menggunakan kualitas audit yaitu KAP The Big Four atau yang lainnya, tidak mempengaruhi tinggi rendahnya penghindaran pajak perusahaan. Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Perusahaan yang memilih menggunakan jasa auditor yang berkualitas dapat menjamin informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor (Sandy, 2015).

Didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Damayanti & Susanto bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Damayanti & Susanto, 2015). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik baik big four maupun non big four memiliki reputasi yang baik dalam melakukan audit perusahaan yang berpedoman terhadap standar pengendalian mutu pada kualitas audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI) serta adanya aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sehingga dalam melaksanakan audit sudah dipastikan sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan (Nugraheni, 2018). Didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Baihaqqi bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Baihaqqi, 2019).

4.6.5. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan kepemilikan saham dari pihak manajemen yang semakin banyak maupun sedikit cenderung tetap dengan jumlah saham perusahaan, maka tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Didukung penelitian Prasetyo juga menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan (Prasetyo, 2018).

Didukung dengan penelitian sebelumnya bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari konsentrasi kepemilikan atau presentase saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan manajemen. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, walaupun memiliki kepemilikan manajerial yang cukup tidak menghilangkan sepenuhnya perilaku oportunistik yang dimiliki oleh manajer (Krisna, 2019). Penelitian lain juga menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Kalbuna et al., 2017).

4.6.6. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat diartikan tinggi rendahnya peran kepemilikan institusional dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, tidak mampu berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penghindaran pajak. Artinya keberadaan pemilik institusional masih kurang berpartisipasi dalam mengawasi manajemen perusahaan sehingga tidak dapat meningkatkan upaya perusahaan dalam memaksimalkan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Damayanti & Susanto, 2015). Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sesuai penelitian Fitria. Berarti besar kecilnya jumlah kepemilikan institusional tidak mempengaruhi perilaku perusahaan dalam sampel untuk melakukan penghindaran pajak (Fitria, 2018).

4.6.7. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak

Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya nilai dari aset yang ada cenderung tetap sehingga belum mampu memberikan gambaran untuk penghindaran pajak. Hasil temuan didukung penelitian Ningsih yang menunjukkan intensitas aset tetap tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Ningsih, 2020). Begitu pula penelitian Virginia yang diketahui bahwa tidak ada pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*. Semakin besar atau kecilnya intensitas aset tetap tidak mempengaruhi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Virginia, 2017).

Intensitas aset tetap adalah perusahaan berinvestasi lebih besar pada aset tetap diantaranya peralatan, mesin, bangunan, pabrik, dan property lainnya. Aset tetap akan mengalami penyusutan yang tercatat dalam laporan keuangan disebut dengan biaya penyusutan. Proporsi intensitas aset tetap yang besar akan menimbulkan beban depresiasi atas aset tetap yang besar pula.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Komisaris independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. Komite audit tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
4. Kualitas audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
5. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
6. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
7. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan *Effect Tax Rate* (ETR) sebagai proksi dalam variabel *Tax avoidance*.

2. Penelitian terbatas menggunakan perusahaan manufaktur yang hanya menghasilkan sampel penelitian 35 perusahaan dengan periode selama tiga tahun dari 2016 sampai 2018. Sehingga hasil yang diperoleh tingkat generalisasinya masih rendah.
3. Penelitian ini terbatas pada penggunaan variabel *corporate sosial responsibility*, *good corporate governance*, dan intensitas aset tetap.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi *tax avoidance* yang lain sehingga dapat mengkonfirmasi kembali hasil pengujian terhadap *tax avoidance* misalnya CETR (Cash Effective Tax Rate), Book Tax Gap dll.
2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan data tahun penelitian, karena penelitian ini hanya menggunakan data selama 3 tahun yaitu tahun 2016-2018, jadi dapat ditambah tahunnya menjadi 5 tahun dengan mengambil data tahun terbaru.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel - variabel lain yang mampu mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga penjelasan variabel penghindaran pajak oleh variabel independen semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N., A., & Lulus, K. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing* 123, 8(2), 95–189.
- Astuti, T. P., & Aryani, A. Y. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi* XX, 3, 375–388.
- Chariri, A., & Ghazali, I. (2007). “*Teori Akuntansi*.” Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chen, Shuping, Xia, C., & Qiang, C. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressiv than Non-family Firms? *Journal of Financial Economics*, 41–61.
- Damayanti, F., & Tridahus, S. (2015). *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax avoidance*. 5(2). <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Dewi, N. L. P. P., & Naniek, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830–859.
- Dewi, N. N., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteistik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada *Tax avoidance* Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 6, 249–260.
- Dharma, N. B. S., & Naniek, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556.
- Diantari, P. R., & Ulupi, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi epemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*. *Akuntansi Universitas Udaya*, 16, 702–732.
- Diaz, P. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127–178.
- Hanum, & Zulaikhah. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1-10.
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1052–1070.
- Jefri, & Khoiriyah, Y. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Return On Assets Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia*. 13(2).
- Jefri, & Yaumil, K. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Return On Assets Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13(2).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBN 2019*.
- Kurniasih, T., & Sari, M., M. (2013). “Pengaruh Profitabilitass, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 58–66.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *J. Account. Public Policy*, .86-108.
- Lukviarman, N. (2016). *Corporate Governance Menuju Penguatan Konseptual Dan Implementasi Di Indonesia*. PT Era Adicitra Intermedia.
- Manurung, V. L., & Hutabarat, F. (2020). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax avoidance Dengan Mediasi Likuiditas Pada Perusahaan Bumn Yang Terdapat Di Bei Tahun 2017-2019*. 15(3), 478–487.
- Maraya, A., D., & Reni, Y. (2016). Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap *Tax avoidance*:

- Studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2).
- Marthin, Salinding, M. B., & Akim, I. (2017). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW*, 1, 111–132.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management? *Journal of Corporate Finance*, 16, 703–718.
- Ngadiman, & Christiany, P. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi XVIII*, 408–421.
- Noviyani, E., & Dul, M. (2019). *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak*. 8(3), 1–11.
- OJK. (2015). *Otoritas Jasa Keuangan tentang Peraturan OJK No.55/POJK04/2015*. <http://www.komiteaudit.or.id/wp-content/uploads/2017/07/POJK-55.-Pembentukan-dan-Pedoman-Pelaksanaan-Kerja-Komite-Audit.pdf>.
- Pohan C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanti, S., M., & Listya, S. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1642.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax avoidance*. 5(3), 1625–1642.
- Puspita, S., R., & Puji, H. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2).
- Rahmawati, A., Endang, M., G, Wi, & Agusti, R., R. (2016). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan corporate governance terhadap *tax avoidance* (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014). *...Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1), 1–9.

- Ratmono, D., & Winarti, M. S. (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *Jurnal Nominal*, 4(2).
- Sarasati, D., H., & Asyik, N., F. (2018). Pengaruh good corporate governance, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(1).
- Sari, L., L, P., & Agustinus, S. A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(4).
- Sari, M., M, R., & Kurniasih, T. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 16–66.
- Sundari, N., & Vita, A. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK*, 8(1), 85–109.
- Tuanakotta, T. M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Utari, N. K. Y., & Ni Luh, S. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2202–2230.
- Wardani, A., K., Eva, A., & Amirah. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance (GCG), Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016). *Permana*, 20(2).
- Watson, L. (2011). Corporate Social Responsibility, *Tax avoidance*, and Tax Aggresiveness. *Pennsylvania : The Pennsylvania State University*.
- Widodo, R. R. (2019). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Leverage, Koneksi Politik, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Tax avoidance* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaraan Pajak

Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012- 2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(20).

Winata, F. (2014). Pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1).

Yulyanah, & Sri, Y. (2019). *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1).



LAMPIRAN 1
91 Indikator Berdasarkan GRI G4

KATEGORI EKONOMI		
Kinerja ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program
	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasi yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau Volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar

		kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian

		terhadap UU dan peraturan lingkungan
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL		
SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender

	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		
Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia

	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
pekerja paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
praktik pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi
Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
asesmen pemasok atas hak asasi manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT		
Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan

		masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang
Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK		
kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis
Pelabelan Produk dan Jasa		
	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan

		jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERUSAHAAN

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	ADES	Akasha Wira Internasional Tbk.
2.	AGII	Aneka Gas Industry Tbk.
3.	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk.
4.	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk.
5.	AUTO	Astra Auto Part Tbk.
6.	BATA	Sepatu Bata Tbk.
7.	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk.
8.	BUDI	Budi Strach and Sweetener Tbk.
9.	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk.
10.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
11.	EKAD	Ekadharma Internasional Tbk.
12.	GGRM	Gudang Garam Tbk.
13.	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
14.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
15.	IGAR	Champion Pasific Indonesia Tbk.
16.	IMPC	Impack Pratama Industry Tbk.
17.	INAI	Indah Aluminium Industry Tbk.
18.	INCI	Intan Wijaya Internasional Tbk.
19.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
20.	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
21.	JECC	Jembo Cable Company Tbk.
22.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
23.	KBLI	Kedawung Setia Industrial Tbk.
24.	KBLM	KMI Wire and Cable Tbk.
25.	KDSI	Kabelindo Murni Tbk.
26.	KINO	Kino Indonesia Tbk.
27.	KLBF	Kabel Farma Tbk.
28.	LION	Lion Metal Works Tbk.
29.	LMSH	Lionmesh Prima Tbk.
30.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
31.	ROTI	Nippon Indosiar Corporindo Tbk.
32.	SIDO	Industry Jamu Dan Farmasi Sidomuncul Tbk.
33.	SMSM	Selamat Sempurna Tbk.
34.	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk.
35.	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.

LAMPIRAN 3

DATA PENELITIAN

No	Perusahaan	Tahun	ETR	CSR	INDP	KOMA	KUA	KM	KI	IAT
1	ADES	2016	0.09	0.63	0.33	3.00	0.00	0.00	0.92	0.58
2		2017	0.25	0.27	0.33	3.00	0.00	0.00	0.92	0.65
3		2018	0.24	0.22	0.33	3.00	0.00	0.00	0.92	0.59
4	AGII	2016	0.27	0.60	0.20	3.00	0.00	0.00	0.92	0.75
5		2017	0.27	0.63	0.17	3.00	0.00	0.00	0.60	0.76
6		2018	0.23	0.42	0.17	3.00	0.00	0.00	0.92	0.76
7	AKPI	2016	0.28	0.40	0.33	3.00	1.00	0.00	0.69	0.67
8		2017	0.58	0.51	0.33	3.00	1.00	0.00	0.90	0.63
9		2018	0.30	0.54	0.33	3.00	1.00	0.00	0.70	0.60
10	AMFG	2016	0.30	0.53	0.33	3.00	1.00	0.00	0.97	0.68
11		2017	0.39	0.53	0.33	3.00	1.00	0.00	0.85	0.68
12		2018	0.41	0.43	0.33	3.00	1.00	0.00	0.85	0.74
13	AUTO	2016	0.28	0.44	0.38	3.00	1.00	0.00	0.97	0.66
14		2017	0.23	0.67	0.38	3.00	1.00	0.00	0.97	0.65
15		2018	0.21	0.57	0.38	3.00	1.00	0.00	0.80	0.62
16	BATA	2016	0.35	0.42	0.40	3.00	1.00	0.00	0.87	0.34
17		2017	0.33	0.53	0.50	3.00	1.00	0.00	0.87	0.34
18		2018	0.27	0.52	0.33	3.00	1.00	0.00	0.96	0.35
19	BTON	2016	0.28	0.49	0.50	3.00	0.00	0.00	0.02	0.27
20		2017	0.23	0.25	0.33	3.00	0.00	0.00	0.02	0.25
21		2018	0.17	0.27	0.33	3.00	0.00	0.00	0.01	0.19
22	BUDI	2016	0.27	0.40	0.50	3.00	0.00	0.00	0.53	0.63
23		2017	0.25	0.40	0.50	3.00	0.00	0.00	0.53	0.65
24		2018	0.32	0.49	0.50	3.00	0.00	0.00	0.91	0.57
25	CEKA	2016	0.13	0.47	0.50	3.00	1.00	0.00	0.87	0.23
26		2017	0.25	0.08	0.33	3.00	1.00	0.00	0.87	0.29
27		2018	0.25	0.21	0.33	3.00	1.00	0.00	0.87	0.31
28	CPIN	2016	0.14	0.30	0.50	5.00	0.00	0.00	0.99	0.50
29		2017	0.21	0.22	0.50	4.00	0.00	0.00	0.99	0.52
30		2018	0.11	0.26	0.50	3.00	0.00	0.00	1.00	0.49
31	EKAD	2016	0.23	0.25	0.50	3.00	1.00	0.00	0.75	0.52
32		2017	0.30	0.27	0.50	3.00	1.00	0.00	0.76	0.48
33		2018	0.31	0.27	0.50	3.00	1.00	0.00	0.82	0.46
34	GGRM	2016	0.25	0.38	0.50	3.00	0.00	0.00	0.95	0.33
35		2017	0.25	0.19	0.50	3.00	0.00	0.00	0.76	0.34

No	Perusahaan	Tahun	ETR	CSR	INDP	KOMA	KUA	KM	KI	IAT
36		2018	0.25	0.26	0.50	3.00	0.00	0.00	0.89	0.34
37	HMSP	2016	0.25	0.41	0.40	3.00	1.00	0.00	0.99	0.21
38		2017	0.23	0.43	0.50	3.00	1.00	0.00	0.99	0.21
39		2018	0.24	0.45	0.43	3.00	1.00	0.00	0.99	0.19
40	ICBP	2016	0.27	0.38	0.50	3.00	0.00	0.00	1.00	0.46
41		2017	0.32	0.25	0.50	3.00	0.00	0.00	1.00	0.48
42		2018	0.27	0.45	0.50	3.00	0.00	0.00	1.00	0.59
43	IGAR	2016	0.27	0.46	0.33	3.00	1.00	0.01	0.85	0.17
44		2017	0.28	0.46	0.33	3.00	1.00	0.01	0.85	0.23
45		2018	0.32	0.47	0.33	3.00	1.00	0.00	0.85	0.27
46	IMPC	2016	0.13	0.43	0.50	3.00	0.00	0.00	0.92	0.45
47		2017	0.08	0.67	0.50	3.00	0.00	0.00	0.89	0.48
48		2018	0.02	0.62	0.50	3.00	0.00	0.00	0.90	0.49
49	INAI	2016	0.03	0.46	0.50	3.00	0.00	0.00	0.67	0.27
50		2017	0.04	0.63	0.50	3.00	0.00	0.00	0.76	0.29
51		2018	0.10	0.58	0.33	3.00	0.00	0.00	0.63	0.25
52	INCI	2016	0.18	0.43	0.33	3.00	0.00	0.00	0.01	0.56
53		2017	0.25	0.19	0.33	3.00	0.00	0.00	0.02	0.52
54		2018	0.24	0.22	0.33	3.00	0.00	0.00	0.02	0.51
55	INDF	2016	0.29	0.43	0.38	3.00	0.00	0.00	0.01	0.65
56		2017	0.27	0.25	0.38	3.00	0.00	0.00	0.01	0.63
57		2018	0.28	0.29	0.38	3.00	0.00	0.00	0.98	0.66
58	INTP	2016	0.06	0.13	0.43	3.00	1.00	0.00	0.51	0.52
59		2017	0.08	0.46	0.43	3.00	1.00	0.00	0.51	0.55
60		2018	0.14	0.51	0.43	3.00	1.00	0.00	1.00	0.56
61	JECC	2016	0.25	0.52	0.67	3.00	0.00	0.01	0.91	0.29
62		2017	0.25	0.12	0.67	3.00	0.00	0.01	0.90	0.33
63		2018	0.28	0.27	0.67	3.00	0.00	0.00	0.96	0.32
64	JPFA	2016	0.22	0.37	0.67	3.00	1.00	0.00	0.63	0.43
65		2017	0.39	0.77	0.67	3.00	1.00	0.00	0.63	0.44
66		2018	0.27	0.53	0.67	3.00	1.00	0.00	0.64	0.46
67	KBLI	2016	0.13	0.47	0.40	3.00	1.00	0.00	0.86	0.57
68		2017	0.16	0.16	0.33	3.00	1.00	0.00	0.55	0.39
69		2018	0.21	0.21	0.33	3.00	1.00	#DIV/0!	0.85	0.33
70	KBLM	2016	0.43	0.12	0.88	3.00	0.00	0.00	0.88	0.38
71		2017	0.28	0.25	0.33	3.00	0.00	0.00	0.87	0.56
72		2018	0.24	0.23	0.67	3.00	0.00	0.00	0.06	0.53
73	KDSI	2016	0.26	0.40	0.40	3.00	0.00	0.00	0.76	0.38

No	Perusahaan	Tahun	ETR	CSR	INDP	KOMA	KUA	KM	KI	IAT
74		2017	0.35	0.19	0.40	3.00	0.00	0.00	0.80	0.37
75		2018	0.27	0.21	0.25	3.00	0.00	0.00	0.79	0.41
76	KINO	2016	0.17	0.37	0.50	3.00	0.00	0.00	0.87	0.43
77		2017	0.22	0.27	0.50	3.00	0.00	0.00	0.88	0.45
78		2018	0.32	0.32	0.50	3.00	0.00	0.00	0.87	0.45
79	KLBF	2016	0.24	0.41	0.43	3.00	1.00	0.00	0.57	0.37
80		2017	0.24	0.35	0.44	3.00	1.00	0.00	0.57	0.40
81		2018	0.24	0.19	0.29	3.00	1.00	0.00	0.94	0.41
82	LION	2016	0.34	0.48	0.33	3.00	0.00	0.00	0.71	0.21
83		2017	0.54	0.30	0.33	3.00	0.00	0.00	0.57	0.26
84		2018	0.39	0.31	0.33	3.00	0.00	0.00	0.58	0.26
85	LMSH	2016	0.34	0.70	0.33	3.00	0.00	0.00	0.59	0.40
86		2017	0.26	0.69	0.33	3.00	0.00	0.00	0.64	0.44
87		2018	0.45	0.23	0.33	3.00	0.00	0.00	0.32	0.43
88	MLBI	2016	0.43	0.21	0.33	3.00	1.00	0.00	0.82	0.60
89		2017	0.26	0.24	0.33	3.00	1.00	0.00	0.82	0.57
90		2018	0.27	0.24	0.33	3.00	1.00	0.00	0.82	0.57
91	ROTI	2016	0.41	0.18	0.33	3.00	1.00	0.00	0.69	0.67
92		2017	0.27	0.26	0.33	3.00	1.00	0.00	0.70	0.49
93		2018	0.29	0.22	0.33	3.00	1.00	0.00	0.99	0.57
94	SIDO	2016	0.22	0.19	0.33	3.00	1.00	0.00	0.81	0.40
95		2017	0.28	0.20	0.33	3.00	1.00	0.00	0.81	0.48
96		2018	0.31	0.29	0.20	3.00	1.00	0.00	0.90	0.54
97	SMSM	2016	0.24	0.36	0.50	3.00	1.00	0.00	0.21	0.35
98		2017	0.13	0.49	0.50	3.00	1.00	0.00	0.84	0.36
99		2018	0.11	0.44	0.40	3.00	1.00	0.00	0.84	0.34
100	TOTO	2016	0.25	0.49	0.40	3.00	0.00	0.00	0.92	0.50
101		2017	0.26	0.62	0.20	3.00	0.00	0.00	0.96	0.53
102		2018	0.23	0.45	0.20	3.00	0.00	0.00	0.92	0.54
103	WIIM	2016	0.22	0.36	0.50	3.00	0.00	0.00	0.28	0.26
104		2017	0.26	0.20	0.33	3.00	0.00	0.00	0.05	0.30
105		2018	0.28	0.26	0.33	3.00	0.00	0.00	0.06	0.29

LAMPIRAN 4

HASIL PENELITIAN

ANALISIS DESKRIPTIF

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Y
Mean	0.376452	41.13338	3.028571	0.457143	10.73591	74.35072	0.453776	0.253178
Median	0.384615	37.50000	3.000000	0.000000	0.256652	84.81882	0.459170	0.253385
Maximum	0.769231	88.37000	5.000000	1.000000	89.45000	99.78000	0.761544	0.580871
Minimum	0.076923	16.66667	3.000000	0.000000	0.000000	1.153238	0.173987	0.015790
Std. Dev.	0.153552	12.05074	0.217377	0.500549	20.91217	27.25688	0.149612	0.095215
Skewness	0.308182	0.830270	8.066875	0.172062	2.473657	-1.567448	0.051046	0.218115
Kurtosis	2.305269	4.555358	69.54597	1.029605	8.668357	4.581791	2.081110	4.588616
Jarque-Bera	3.773688	22.64732	20512.91	17.50383	247.6520	53.94219	3.739668	11.87374
Probability	0.151549	0.000012	0.000000	0.000158	0.000000	0.000000	0.154149	0.002640
Sum	39.52747	4319.005	318.0000	48.00000	1127.270	7806.825	47.64649	26.58373
Sum Sq. Dev.	2.452126	15102.91	4.914286	26.05714	45481.15	77265.49	2.327924	0.942862
Observations	105	105	105	105	105	105	105	105

CHOW TEST

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: PANEL

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.944729	(34,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	135.279358	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 04/27/21 Time: 10:36

Sample: 2016 2018

Included observations: 3

Cross-sections included: 35

Total pool (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.440255	0.140131	3.141737	0.0022
X1?	-0.117649	0.061503	-1.912897	0.0587
X2?	-0.000491	0.000808	-0.608172	0.5445
X3?	-0.064014	0.043314	-1.477908	0.1426
X5?	0.000494	0.000532	0.929030	0.3552
X6?	0.000288	0.000398	0.723278	0.4712
X7?	0.098246	0.068596	1.432241	0.1553
R-squared	0.078480	Mean dependent var		0.253178
Adjusted R-squared	0.022061	S.D. dependent var		0.095215
S.E. of regression	0.094159	Akaike info criterion		-1.823316
Sum squared resid	0.868866	Schwarz criterion		-1.646385
Log likelihood	102.7241	Hannan-Quinn criter.		-1.751620
F-statistic	1.391009	Durbin-Watson stat		0.944587
Prob(F-statistic)	0.225849			

HAUSMAN TEST

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: PANEL

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.220004	6	0.3990

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1?	-0.160961	-0.131589	0.000900	0.3275
X2?	0.001493	0.000290	0.000001	0.1043
X3?	0.018375	-0.013274	0.000381	0.1048
X5?	-0.000524	0.000043	0.000000	0.1986
X6?	0.000567	0.000244	0.000000	0.3404
X7?	0.181223	0.104437	0.026904	0.6397

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 04/27/21 Time: 10:37

Sample: 2016 2018

Included observations: 3

Cross-sections included: 35

Total pool (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.077944	0.176924	0.440549	0.6610
X1?	-0.160961	0.062894	-2.559224	0.0129
X2?	0.001493	0.001142	1.307360	0.1958
X3?	0.018375	0.043285	0.424520	0.6726
X5?	-0.000524	0.000703	-0.745320	0.4588
X6?	0.000567	0.000528	1.074576	0.2866
X7?	0.181223	0.188067	0.963608	0.3389

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.745920	Mean dependent var	0.253178
Adjusted R-squared	0.587120	S.D. dependent var	0.095215
S.E. of regression	0.061181	Akaike info criterion	-2.464072
Sum squared resid	0.239562	Schwarz criterion	-1.427764
Log likelihood	170.3638	Hannan-Quinn criter.	-2.044139
F-statistic	4.697227	Durbin-Watson stat	3.191032
Prob(F-statistic)	0.000000		

RANDOM EFFECT

Dependent Variable: Y?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/22/21 Time: 10:55
 Sample: 2016 2018
 Included observations: 3
 Cross-sections included: 35
 Total pool (balanced) observations: 105
 Swamy and Arora estimator of component variances

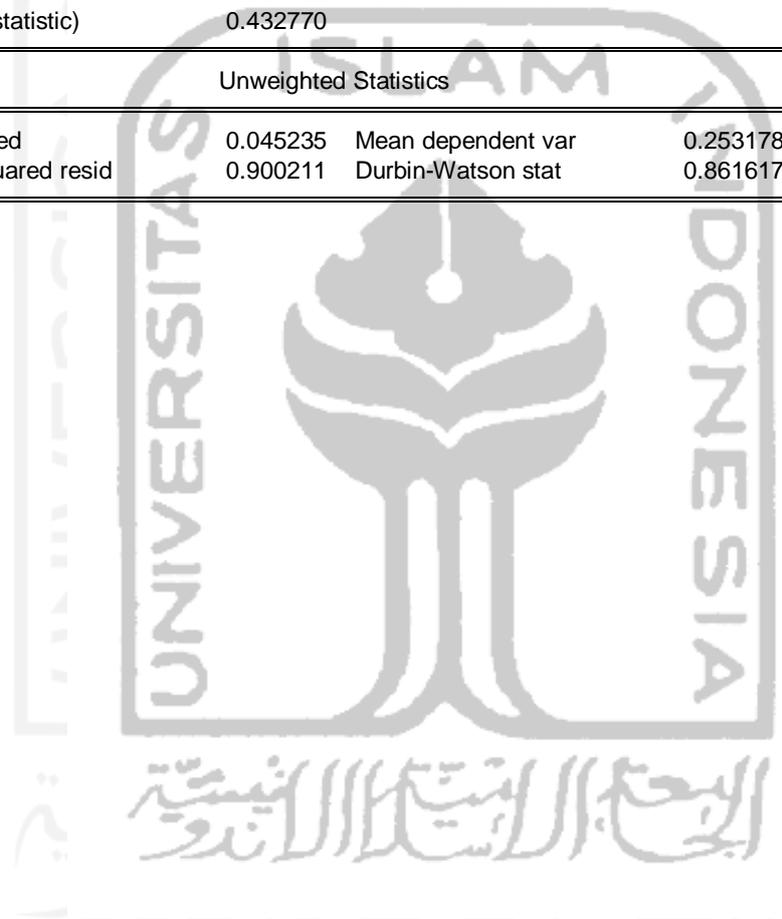
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.249884	0.136499	1.830659	0.0702
X1?	-0.131787	0.055473	-2.375703	0.0195
X2?	0.000340	0.000877	0.388118	0.6988
X3?	-0.011012	0.038875	-0.283281	0.7776
X4?	0.015083	0.029216	0.516261	0.6068
X5?	5.53E-05	0.000552	0.100214	0.9204
X6?	0.000221	0.000409	0.540875	0.5898
X7?	0.106473	0.093183	1.142626	0.2560
Random Effects (Cross)				
_ADES--C	-0.056039			
_AGII--C	0.004549			
_AKPI--C	0.100737			
_AMFG--C	0.078005			
_AUTO--C	-0.015313			
_BATA--C	0.064155			
_BTON--C	0.008332			
_BUDI--C	0.019635			
_CEKA--C	-0.042877			
_CPIN--C	-0.092312			
_EKAD--C	-0.001825			
_GGRM--C	-0.001392			
_HMSP--C	0.005157			
_ICBP--C	0.019103			
_IGAR--C	0.050015			
_IMPC--C	-0.125785			
_INAI--C	-0.121089			
_INCI--C	-0.020921			
_INDF--C	0.004142			
_INTP--C	-0.147257			
_JECC--C	0.002352			
_JPFA--C	0.040922			
_KBLI--C	-0.083261			
_KBLM--C	0.032609			
_KDSI--C	0.034547			
_KINO--C	-0.015745			
_KLBF--C	-0.015130			
_LION--C	0.166325			
_LMSH--C	0.112037			
_MLBI--C	0.020788			
_ROTI--C	0.024591			
_SIDO--C	-0.010600			
_SMSM--C	-0.068107			
_TOTO--C	0.011041			

_WIIM--C 0.018611

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.076874	0.6122
Idiosyncratic random		0.061181	0.3878

Weighted Statistics			
R-squared	0.067607	Mean dependent var	0.105708
Adjusted R-squared	0.000321	S.D. dependent var	0.061170
S.E. of regression	0.061160	Sum squared resid	0.362831
F-statistic	1.004768	Durbin-Watson stat	2.137736
Prob(F-statistic)	0.432770		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.045235	Mean dependent var	0.253178
Sum squared resid	0.900211	Durbin-Watson stat	0.861617



FIXED EFFECT

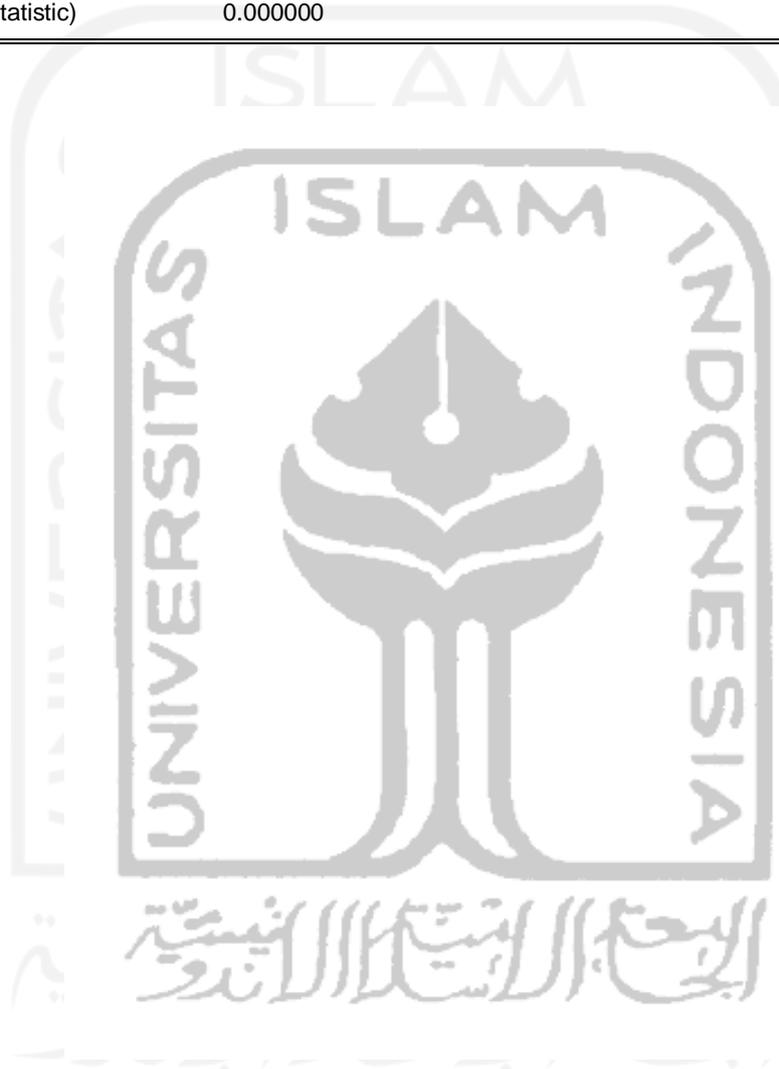
Dependent Variable: Y?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 04/27/21 Time: 10:36
 Sample: 2016 2018
 Included observations: 3
 Cross-sections included: 35
 Total pool (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.077944	0.176924	0.440549	0.6610
X1?	-0.160961	0.062894	-2.559224	0.0129
X2?	0.001493	0.001142	1.307360	0.1958
X3?	0.018375	0.043285	0.424520	0.6726
X5?	-0.000524	0.000703	-0.745320	0.4588
X6?	0.000567	0.000528	1.074576	0.2866
X7?	0.181223	0.188067	0.963608	0.3389
Fixed Effects (Cross)				
_ADES--C	-0.088606			
_AGII--C	0.003182			
_AKPI--C	0.128741			
_AMFG--C	0.102235			
_AUTO--C	-0.026245			
_BATA--C	0.086735			
_BTON--C	0.092467			
_BUDI--C	-0.006263			
_CEKA--C	-0.040692			
_CPIN--C	-0.179470			
_EKAD--C	-0.016502			
_GGRM--C	-0.022435			
_HMSP--C	0.017341			
_ICBP--C	-0.012628			
_IGAR--C	0.119186			
_IMPC--C	-0.174831			
_INAI--C	-0.139282			
_INCI--C	0.007349			
_INDF--C	-0.027067			
_INTP--C	-0.182101			
_JECC--C	-0.016361			
_JPFA--C	0.033446			
_KBLI--C	-0.092824			
_KBLM--C	0.004388			
_KDSI--C	0.041512			
_KINO--C	-0.040633			
_KLBF--C	-0.008100			
_LION--C	0.217979			
_LMSH--C	0.159921			
_MLBI--C	0.020485			
_ROTI--C	0.025765			
_SIDO--C	0.007362			
_SMSM--C	-0.068040			
_TOTO--C	0.010018			
_WIIM--C	0.063966			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.745920	Mean dependent var	0.253178
Adjusted R-squared	0.587120	S.D. dependent var	0.095215
S.E. of regression	0.061181	Akaike info criterion	-2.464072
Sum squared resid	0.239562	Schwarz criterion	-1.427764
Log likelihood	170.3638	Hannan-Quinn criter.	-2.044139
F-statistic	4.697227	Durbin-Watson stat	3.191032
Prob(F-statistic)	0.000000		



HASIL UJI ASUMSI

UJI MULTIKOLONIERITAS

Variance Inflation Factors
 Date: 04/27/21 Time: 10:44
 Sample: 1 105
 Included observations: 105

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.020591	242.5273	NA
X1	0.003806	7.399360	1.046839
X2	6.65E-07	14.37055	1.125955
X3	0.001923	208.8053	1.060051
X4	0.000369	1.986335	1.078296
X5	2.86E-07	1.849152	1.460517
X6	1.64E-07	12.06367	1.417201
X7	0.004752	12.76588	1.240899

UJI HETEROKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: Glejser

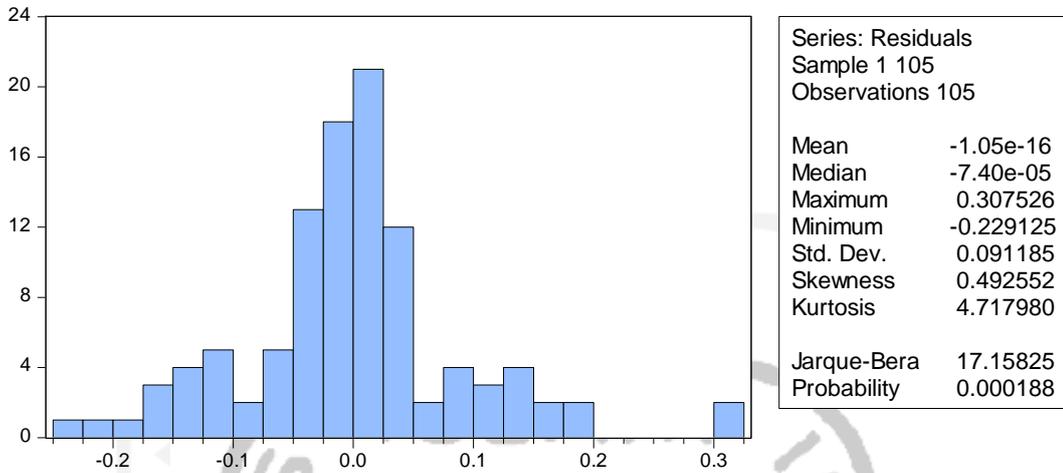
F-statistic	1.330195	Prob. F(7,97)	0.2444
Obs*R-squared	9.196509	Prob. Chi-Square(7)	0.2389
Scaled explained SS	12.37705	Prob. Chi-Square(7)	0.0888

Test Equation:
 Dependent Variable: ARESID
 Method: Least Squares
 Date: 04/28/21 Time: 10:16
 Sample: 1 105
 Included observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.167850	0.099729	1.683069	0.0956
X1	0.083002	0.042875	1.935917	0.0558
X2	0.000319	0.000567	0.562444	0.5751
X3	-0.032122	0.030477	-1.053970	0.2945
X4	0.000745	0.013349	0.055777	0.9556
X5	-0.000677	0.000372	-1.819380	0.0719
X6	-0.000321	0.000281	-1.142040	0.2562
X7	-0.048221	0.047909	-1.006505	0.3167

R-squared	0.087586	Mean dependent var	0.062255
Adjusted R-squared	0.021741	S.D. dependent var	0.066345
S.E. of regression	0.065620	Akaike info criterion	-2.536748
Sum squared resid	0.417678	Schwarz criterion	-2.334541
Log likelihood	141.1793	Hannan-Quinn criter.	-2.454810
F-statistic	1.330195	Durbin-Watson stat	1.578563
Prob(F-statistic)	0.244378		

UJI NORMALITAS



UJI AUTOKORELASI

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 04/28/21 Time: 10:12
 Sample (adjusted): 2 105
 Included observations: 104 after adjustments
 Convergence achieved after 8 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.362272	0.136780	2.648573	0.0095
X1	-0.093273	0.061455	-1.517742	0.1324
X2	0.000540	0.000794	0.680194	0.4980
X3	-0.052857	0.040929	-1.291435	0.1997
X4	-0.015244	0.022433	-0.679525	0.4985
X5	0.000270	0.000539	0.500510	0.6179
X6	0.000314	0.000397	0.789393	0.4318
X7	0.106152	0.079329	1.338121	0.1841
AR(1)	0.513855	0.087721	5.857863	0.0000

R-squared	0.298458	Mean dependent var	0.254727
Adjusted R-squared	0.239380	S.D. dependent var	0.094339
S.E. of regression	0.082276	Akaike info criterion	-2.074902
Sum squared resid	0.643093	Schwarz criterion	-1.846061
Log likelihood	116.8949	Hannan-Quinn criter.	-1.982192
F-statistic	5.051988	Durbin-Watson stat	1.924204
Prob(F-statistic)	0.000030		

Inverted AR Roots	.51
-------------------	-----